

Swantara

Majalah Triwulanan Lemhannas RI No. 01 TAHUN I/Mei 2012

Opini

Muji Sutrisno

Membangsa Indonesia

Irwan Abdullah

Membela Negara

Dewi Sri Laksmi Triman

Indonesia Mengejar BRIC

Anhar Gonggong

Pembekal Kepemimpinan Nasional

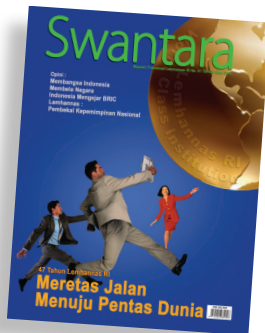


47 Tahun Lemhannas RI

Meretas Jalan Menuju Pentas Dunia

ISSN 2252-9659



**Pelindung**

Budi Susilo Soepandji

Pembina

Moeldoko

Pengarah

Chandra Manan Mangan

Penasehat

Syahrul Ansory

Hery Haryanto

Santoso

Kontributor Ahli

Dadan Umar Daihani, Timotius Harsono

Rosita S. Noor, Miyasto, Leonardi

Pemimpin Redaksi

Sahat Aritonang

Redaktur Pelaksana

E. Estu Prabowo

Editor

Nanang Sunarto

Staf redaksi

Megawarni Simamora, GT. Situmorang,

B. Iman Aryanto, Endah Heliana, Trias Noverdi

Koordinator Fotografer

Pangarahon Siregar

Fotografer

Ariyanto, Syafrizal

Grafis

P. Budi Santoso

Pemimpin Administrasi

Sumurung

Staf Administrasi

Linda Purnamasari, Gatot

Sirkulasi

Supriyono

Konsultan Media

Eddy Soepadmo

Alamat Redaksi

Gedung Lemhannas RI

Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta

Telp. (021) 3832108, 3832105**Fax** (021)-34551926**Email** : humas.lemhannasri@gmail.com**Website** : www.lemhannas.go.id**Dicetak oleh** : PT. Yellow Multi Media

Isti diluar tanggung jawab percetakan



Sungguh membahagiakan. Tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-47, 20 Mei 2012, Lemhannas RI menerbitkan majalah baru yang diberi nama Swantara.

Dari segi etimologi, Swantara terdiri dari kata swa dan nusantara yang berarti nusantara yang mandiri. Nama ini dipilih karena dipandang memiliki unsur khas, dan dengan kekhasan itu Swantara dipandang mampu mewakili Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Majalah ini terbit sekali tiga bulan yang dikemas sedemikian rupa sehingga berperan sebagai media informasi dan komunikasi antara Lemhannas RI dengan stakeholder-nya, guna menghasilkan persepsi yang mendukung kemajuan negara dan bangsa Indonesia.

Setiap kali terbit, Swantara akan memuat Laporan Utama, Opini, Profil dan Suara Alumni. Selain itu ada pula Galeri, Serambi Monas, Agenda dan Surat Pembaca, yang kesemuanya merupakan rubrik tetap. Muatan lain yang menarik tentu akan selalu dipertimbangkan sesuai dengan ide-ide kreatif Dewan Redaksi.

Pada edisi pertama ini, Swantara menyajikan Laporan Utama mengenai kiprah Lemhannas RI memasuki usianya yang ke-47 tahun. Di dalamnya terdapat pokok-pokok pikiran Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA dan mantan Gubernur Prof. Dr. Muladi, SH. Gagasan-gagasan dari Sekretaris Utama Lemhannas RI, Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc, Mayjen TNI (Purn) H. Tri Tamtomo, SH dan Sekretaris Dewan Pengarah Lemhannas RI, Dr. Ardi Partadinata, MH, M.Si.

Opini Anhar Gonggong membawa kita kembali kepada perjalanan panjang Lemhannas RI sejak awal didirikan dan tantanganyang dihadapi saat ini berjudul Lemhannas : Pembekal Kepemimpinan Nasional. Sejarahwan ini adalah Tenaga Profesional di Lemhannas RI. Tulisan menggugah lainnya datang dari Prof. Irwan Abdullah, guru besar Antropologi UGM dengan judul Membela Negara.

Tidak hanya itu, pembaca juga dapat membaca Serambi Monas – kolom motivasi yang diisi Wagub Lemhannas RI, Letjen TNI Moeldoko, M.Si, dengan judul Mengasah Gergaji. Sebagai terbitan pertama, tentunya majalah ini memerlukan perhatian dan jalinan komunikasi dengan lingkungannya. Ibarat bayi yang baru lahir, Swantara bisa saja disebut imut, cantik atau menggemaskan. Tetapi, proses alamiah akan menghantarnya pada kedewasaan dan semakin menarik, hingga pada waktunya khalayak diharapkan akan menjadikannya sebagai salah satu referensi tentang nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan nasional.

Selamat membaca.

Salam,

Brigjen TNI Sahat Aritonang
Pemimpin Redaksi

Swantara menerima artikel dan opini dari luar Lemhannas RI dan akan dimuat apabila sesuai dengan kebijakan redaksi

Surat Pembaca



Proaktif ke Timur

NKRI memiliki sejumlah keanekaragaman antara lain suku, ras, agama, pendidikan, peradaban, dan sumber daya alam. Keanekaragaman lebih banyak ditemukan di Kawasan Timur jika dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Di Kawasan Timur Indonesia ditemukan warna kulit dari hitam sampai putih, rambut lurus sampai keriting, kepercayaan animisme sampai yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, peradaban primitif sampai modern, buta huruf sampai pendidikan tinggi dan daerah terpencil sampai kota besar.

Oleh sebab itu, guna lebih memahami kondisi NKRI, Lemhannas RI seyogyanya proaktif mengadakan studi/pengkajian terhadap hakikat dan kondisi sejumlah kepelbagaian tersebut.

Abdul Latief Toleng
PPSA Angkatan XVI



Kurangi Durasi Kursus

Lemhannas di bawah kepemimpinan Bapak Budi Susilo Soepanji semakin maju, dan terus meningkat citranya serta terus membangun komunikasi dengan masyarakat. Harapan saya, agar lebih banyak lagi kader-kader pemimpin yang dapat mengikuti pendidikan Lemhannas tetapi perlu ditinjau ulang durasi atau lama waktu pendidikan supaya lebih singkat, sehingga yang mengikuti pendidikan tidak meninggalkan tugas terlalu lama.

Selamat Ulang Tahun Lemhannas RI ke - 47, majulah terus untuk kepentingan NKRI

Rosarita Niken Widiastuti
Direktur Utama LPP RRI



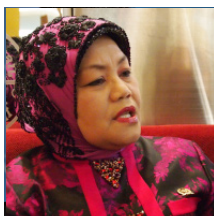
Tingkatkan Kualitas Program Pendidikan

Program Pendidikan yang dilakukan oleh Lemhannas sangat disiplin, teratur, dan tertib sehingga terkesan bahwa program pendidikan ini sangat berwibawa.

Pesan saya, untuk setiap program pendidikan yang dilakukan oleh Lemhannas hendaknya kualitas pelaksanaannya mulai dari proses penerimaan peserta sampai dengan pelaksanaan program pendidikannya terus ditingkatkan.

Sedangkan harapan saya, agar dari program pendidikan di Lemhannas akan lahir tokoh-tokoh nasional dari seluruh Indonesia yang berperan di berbagai bidang dan sendi-sendi kehidupan bangsa.

Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH.
PPRA XLIV



Harus Mengikuti Perkembangan Terkini

"Lemhannas mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah formal. Tentu saja saya merasa bangga dan bersyukur mendapatkan ilmu dari Lemhannas.

Terutama pemahaman wawasan kebangsaan untuk mempersatu bangsa. Ilmu yang saya dapat bisa diterapkan mulai dari lingkup terkecil, yaitu di wilayah Jawa Barat. Lemhannas RI telah menghasilkan alumni yang mumpuni. Namun, tetap harus mengikuti perkembangan terkini. Dulu peserta program Lemhannas RI didominasi oleh TNI dan Polri, tapi sekarang perlu meningkatkan kuota perwakilan LSM, anggota partai, unsur agama, dan organisasi kepemudaan mengingat semakin besarnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan politik saat ini."

Dr. Adjeng Ratna Suminar, S.H., M.M.
Anggota Komisi I DPR, Peserta PPRA XLI

Daftar Isi

Laporan Utama

- 4** Sejarah
- 10** Meretas Jalan Menuju Pentas Dunia
- 14** Kajian Lemhannas Harus “Menggebuk”

Opini

- 8** Pembekal Kepemimpinan Nasional
- 18** Membangsa Indonesia
- 34** Membela Negara
- 50** Indonesia Mengejar BRIC

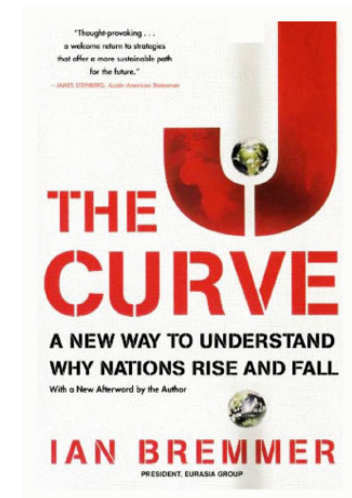


Profil

- 28** Nahkoda Menuju Lembaga Dunia
- 40** Bersyukur Sepanjang Hidup

Kesan dan Pesan

- 20** M. Hatta Rajasa
- 22** Agung Laksono
- 23** Suara Alumni
- 36** Harapan Peserta



Galeri

- 42** Resensi Buku
- 44** Galeri Foto

Renungan

- 54** Serambi Monas

Agenda

- 56** Kegiatan Lemhannas RI



Semangat Kebangkitan Nasional, Semangat Pembentukan Lemhannas

Berawal dari gagasan yang lahir dari keinginan luhur sejumlah perwira tinggi di staf keamanan nasional pada waktu itu, cita-cita pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) bukan lagi hanya sekadar wacana.



1965

Melalui proses waktu, pemikiran dan konsepsi yang cukup panjang dan berliku, akhirnya bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, Lemhannas diresmikan pada 20 Mei 1965. Kala itu sebutan Pertahanan Nasional, mengandung arti Ketahanan dari suatu bangsa yang sedang berevolusi.

Presiden Soekarno yang meresmikan Lemhannas RI di Istana Negara Jakarta menekankan bahwa kegiatan pertahanan nasional harus menyertakan segenap unsur rakyat Indonesia. Institusi ini dicita-citakan berorientasi pada pencapaian tujuan nasional Indonesia. Selain itu, Lemhannas dirancang dan dipersiapkan sebagai pusat pendidikan dan pengkajian masalah-masalah strategis berkaitan dengan pertahanan negara dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan bangsa. Dengan demikian, terlihat betapa penting dan strategisnya keberadaan Lemhannas.

Awal Perkembangan Konsep Tannas

Perkembangan gagasan mengenai Ketahanan itu sendiri dimulai. Sejak tahun 60-an, yang dirintis oleh para perwira ABRI di Seskoad dan oleh peserta KRA I (1965) yang mengembangkan konsep berjudul Ketahanan Revolusi.

1968-1969

Sejak awal pembentukannya gagasan pertama yang dihasilkan oleh Lemhannas adalah gagasan Ketahanan Nasional tahun 1968. Pusat perhatian gagasan Ketahanan Nasional (Tannas) pada waktu itu adalah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, walaupun di bagian lain disinggung pertahanan bagi proses pertumbuhan bangsa dan negara.

Saat itu Lemhannas masih terus melakukan pengkajian untuk menyempurnakan gagasannya tersebut. Penyempurnaan baru dapat diselesaikan pada 1969, yang menggariskan bahwa: "Ketahanan Nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia".

Perbaikan Organisasi dan Perkembangan Tannas

Memasuki tahun ke - 6 sejak pembentukannya, perbaikan dan peningkatan organisasi terus dilakukan. Pada 1971, Gubernur Lemhannas dan staf mengunjungi institusi-institusi pertahanan yang terkenal seperti NDC (National Defence College), NWC (National War College) di pelbagai negara seperti USA, Inggris, Perancis, Belanda, Kanada, Jerman Barat dan juga Vietnam Selatan.

1971-1972

Hasil dari kunjungan tersebut, pada tahun 1972 dilakukan Reorganisasi dan Refungsionalisasi Lemhannas sesuai surat keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Skep. a/21/V/1972. Pertama, tugas pokok Lemhannas adalah membantu Menhankam/Pangab dalam usaha mencapai, mempertinggi dan memelihara Ketahanan Nasional dengan jalan membina terwujudnya integritas dan kerjasama dalam pengarahannya dan penggunaan segenap unsur kekuatan dan potensi nasional. Sedangkan fungsi-fungsi utama Lemhannas adalah mengembangkan kemampuan manajemen tinggi para tenaga senior terpilih (militer dan sipil) yang akan berkecimpung dalam pembinaan politik dan strategi nasional; kedua, menyelenggarakan pengkajian-pengkajian bagi kepentingan nasional umumnya atas dasar pengarahannya/instruksi Dephankam dan pertimbangan/keperluan Lemhannas sendiri.

Dinamika Reorganisasi Lemhannas

Sebagai realisasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tanggal 19 September 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Pangab mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/p/i/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Lembaga Pertahanan Nasional yang baru sebagai pengganti yang lama. Penyusunan kembali organisasi Lemhannas tidak terlepas dari pelaksanaan reorganisasi ABRI secara keseluruhan yakni dipisahkannya jabatan Menhankam dan Pangab.



1974-1978

Lemhannas Sebagai Lembaga Pengkajian dan Pendidikan Nasional Berdasarkan Konsepsi Tannas

Berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974, Lemhannas ditetapkan berkedudukan sebagai salah satu badan pelaksana Departemen Hankam yang membantu Menhankam/Pangab dalam usaha mencapai, mempertinggi dan memelihara Ketahanan Nasional dengan jalan membina terwujudnya integrasi dan kerjasama dalam pengerahan dan penggunaan segenap unsur kekuatan dan potensi nasional.

Sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari Keppres Nomor 7 Tahun 1974, Menhankam/Pangab mengeluarkan keputusan Nomor: Kep/17/VII/1978 tanggal 28 Juli 1978 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Lemhannas yang mengatur kedudukan Lemhannas sebagai suatu badan pelaksana pusat

di tingkat departemen, kedudukan langsung di bawah Menhankam/Pangab, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wapangab. Selanjutnya pada tanggal 28 September 1979, Menhankam/Pangab mengeluarkan surat keputusan Nomor: Kep/25/IX/1979 sebagai penyempurnaan surat keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/17/VII/1978 tanggal 24 Juli 1978 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Lemhannas.

Ketentuan tersebut memberikan landasan dan pedoman organisasi serta tata kerja Lemhannas, dengan tujuan agar Lemhannas dapat melakukan pembinaan dan pengkajian secara utuh segenap unsur kekuatan dan potensi nasional guna memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional. Lebih jauh lagi, Lemhannas sebagai lembaga pengkajian dan pendidikan nasional yang menyelenggarakan pendidikan dan pengkajian berdasarkan konsepsi ketahanan nasional yang bekerjasama dengan badan pemerintahan dan non-pemerintahan lain.

1982-1984

Reorganisasi ini dilakukan untuk memantapkan Lemhannas sebagai lembaga pengkajian dan pendidikan terutama dalam mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru baik secara nasional, regional maupun global. Dengan keluarnya Surat Keputusan Pangab ini, Tugas Pokok Lemhannas adalah Membantu Panglima ABRI dalam menyelenggarakan pengkajian strategis dan pendidikan pemantapan dan pengembangan kader kepemimpinan nasional yang integratif.

“Pertahanan” menjadi “Ketahanan”

Pada tanggal 2 Februari 1994, terjadi perubahan kedudukan (reposisi), Lemhannas yang diserahkan dari Mabes ABRI kepada Departemen Hankam, dengan demikian dimulai lagi periode baru yakni Lemhannas berada di bawah Menhankam dan Gubernur Lemhannas bertanggungjawab kepada Menhankam.

Bersamaan dengan itu kepanjangan “Lembaga Pertahanan Nasional” diubah menjadi “Lembaga Ketahanan Nasional” dengan

1994

singkatan tetap Lemhannas, hanya kata “Pertahanan” diganti menjadi “Ketahanan”. Hal itu juga diperkuat dengan Keppres RI nomor 4 tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional. Perubahan ini sama sekali tidak mengubah tugas pokok dan fungsi Lemhannas. Perubahan dimaksudkan agar Lemhannas lebih meningkatkan lagi peran dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pokok yang diembannya.

Tuntutan lingkungan strategis membawa konsekuensi dan tanggungjawab yang lebih besar bagi Lemhannas. Oleh karena itu, tantangan tugas di masa mendatang bagi Lemhannas akan meningkat. Perubahan status dan kedudukan Lemhannas, tidak otomatis merubah struktur organisasi Lemhannas pada saat itu. Melalui kebijakan pemerintah RI, jabatan Menhankam RI dan Panglima ABRI dijabat oleh satu orang, maka dengan sendirinya Lemhannas berada di bawah Menhankam/Pangab.

Pertama Kali Lemhannas dipimpin Pejabat Sipil

Setelah reformasi, pemerintah melakukan berbagai perubahan sesuai tuntutan reformasi, antara lain perubahan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) menjadi Departemen Pertahanan (Dephan) Republik Indonesia, sedangkan Mabes ABRI berubah menjadi Mabes TNI. Dengan perubahan ini, Lemhannas berada di bawah Dephan RI namun struktur organisasinya tetap, tidak berubah.

1999-2001

Pada Maret 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan statement berkaitan dengan Lemhannas berdasarkan Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2001, tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2001, menyatakan secara tegas tentang tugas Lemhannas. Dengan keluarnya keputusan ini, Lemhannas dikeluarkan dari struktur organisasi Dephan dan harus melakukan restrukturisasi organisasi sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Dengan demikian sejak tahun 2001 kedudukan Lemhannas berada di bawah Presiden sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).



Dengan perubahan tersebut, untuk pertama kalinya kepemimpinan Lemhannas juga menorehkan sejarah, karena untuk pertama kali Lembaga ini dipimpin oleh seorang pejabat sipil yang merintis kariernya dari PNS Golongan I yakni Prof. DR. Ermaya Suradinata, SH, MS yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri.

Diangkatnya Pegawai Negeri Sipil sebagai Gubernur Lemhannas, tidak terlepas dari gagasan awal sewaktu Lemhannas didirikan. Dalam sambutannya Presiden Soekarno yang menyatakan : “..... perang modern bukan sekadar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh unsur yang dimiliki rakyat. Dengan demikian tidak hanya militer yang memperhatikan dan menyempurnakan ketahanan Indonesia, tetapi juga warga sipil”.



Lemhannas sebagai “Centre of Excellence”

Langkah ke depan harus menjadi lebih efisien, efektif, “*inward and outward looking*” dalam berpikir dan

Perubahan yang terjadi dalam restrukturisasi kali ini cukup signifikan, karena telah dirumuskan

2006-2010

memenuhi standar internasional. Perubahan itu bisa berjalan dengan baik, jika Lemhannas dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang mendidik kader pimpinan nasional (*centre of excellence*) dan diikuti pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) pendukungnya, aktualisasi doktrin “*code of conduct*” para pemegang peran, pengembangan dan pembinaan pribadi alumnyanya, partisipasi masyarakat dan kerjasama luar negeri, serta didukung “*political will*” pemerintah.

Oleh karena itu, tak berlebihan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu meminta Lemhannas untuk menjadi Lembaga Kelas Dunia. Keinginan Presiden disambut dengan semangat tinggi oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, SH yang siap merealisasikan perubahan itu. Maka dari itu, dengan paradigma barunya Lemhannas melakukan restrukturisasi dan revitalisasi untuk mengubah Lemhannas menjadi lembaga prestisius dan berkelas dunia.

visi dan misi baru menuju terbentuknya lembaga yang sekelas dengan lembaga-lembaga sejenis lainnya di luar negeri. Perubahan juga terjadi dalam tugas dan fungsi yang bertambah, yaitu fungsi pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan fungsi kerjasama yang diperluas jangkauannya. Dibentuk pula Dewan Pengarah sebagai “*Policy Making Body*” untuk membantu Gubernur dalam mengendalikan kegiatan operasional Lemhannas, sedangkan Gubernur Lemhannas mendapatkan kedudukan dan perlakuan setingkat menteri berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2006.

Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan direalisasikan melalui Peraturan Gubernur Lemhannas RI nomor 01 tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Hal ini untuk menjawab keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menegaskan Lemhannas RI harus dapat menjadi Lembaga Kelas Dunia (*World Class Institution*).

Lemhannas menuju World Class Institution

Pada saat pelantikan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA sebagai Gubernur Lemhannas RI 17 Februari 2011 dan audiensi Gubernur Lemhannas RI yang didampingi pejabat teras Lemhannas RI pada 5 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali harapan beliau agar Lemhannas RI mampu mengembangkan diri menjadi lembaga pendidikan dan kajian yang memiliki standar sebagai lembaga

2011- Sekarang

kelas dunia (*World Class Institution*).

Gubernur Lemhannas RI merespons keinginan Presiden untuk menjadikan Lemhannas sebagai *World Class Institution*, lembaga pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi rujukan nasional, regional dan global dengan membentuk pentahapan pembangunan Lemhannas RI.

Pada 2010, kegiatan pendidikan dan hasil kajian Lemhannas RI ditargetkan menjadi rujukan nasional, kemudian pada 2015, menjadi rujukan regional ASEAN dan selanjutnya, pada 2020 menjadi rujukan regional Asia Pasifik, sedangkan 2025 merupakan langkah panjang menuju pencapaian akhir yakni menjadi rujukan dunia, sehingga diperlukan langkah strategis dan kerja keras segenap jajaran Lemhannas RI. Untuk itu Lemhannas RI melakukan 11 Prinsip Pembaharuan, Revitalisasi dan Restrukturisasi Organisasi, Reformasi Birokrasi, *Strengthening the Capacity Building*, dan *Lemhannas Social Networking*.



Lemhannas RI: Pembekal Kepemimpinan

Nasional

Oleh : Dr. H. Anhar Gonggong

Dari Pengumpul Pemikir ke Pembekal Kepemimpinan

Tanggal 20 Mei, setiap tahun tidak hanya diperingati sebagai hari lahir terbentuknya Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), melainkan juga diperingati sebagai hari besar bagi bangsa-negara Indonesia, sebagai “simbol” kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Simbol itu diambil dari awal terbentuknya Boedi Oetomo, yang oleh pemerintah dianggap sebagai organisasi modern pertama di negeri jajahan kerajaan/bangsa Belanda yang ketika itu bernama *Nederlandsch-indie* (Hindia Belanda). Langsung atau tidak langsung, upacara pembentukan Lemhannas oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno bersamaan dengan hari awal Kebangkitan Nasional, tentu mempunyai makna yang sejalan dengan 20 Mei sebagai hari Kebangkitan Nasional. Dengan demikian, ketika Lemhannas memperingati hari kelahirannya, berarti sekaligus juga diperingati hari Kebangkitan Nasional yang secara simbolis bersumber dari hari pertemuan antarmahasiswa STOVIA—yang diprakarsai oleh Soetomo bersama dengan delapan rekannya—yang menghasilkan pembentukan organisasi modern pertama, Boedi Oetomo.

Sepanjang yang saya ketahui, pembentukan lembaga ini—yang ketika awalnya bernama Lembaga Pertahanan Nasional, dengan Gubernur pertamanya Mayor Jenderal Wiluyo Puspojudho—dimaksudkan sebagai lembaga “pengumpul” pemikir (*think tank*), dan gubernurnya sekaligus sebagai menteri negara ketika itu. Namun dalam perkembangannya kemudian, Lemhannas bertambah tugas fungsinya, karena tidak hanya mengemban tugas sebagai pengumpul pemikir, melainkan bertambah menjadi lembaga pendidikan yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional, yaitu sebagai pembekal kepemimpinan nasional. Dengan tambahan tugas-fungsi yang demikian itu, sebenarnya lembaga ini tidak hanya berkaitan dengan posisinya mengembangkan pemahaman tentang strategi sebagai mata pelajaran pendidikan, melainkan pada dirinya

sendiri sebagai lembaga dengan posisi strategis yang berfungsi untuk penguatan pondasi tegaknya republik ini. Lembaga ini membekali peserta didiknya untuk “persiapan” kepemimpinan nasional bagi negara ini. Dengan demikian, peserta didik yang diterima di lembaga ini berkaitan dengan strategi pembekalan untuk kepemimpinan nasional.

Posisi Lemhannas di dalam Orde Baru

Pembentukan Lemhannas dilakukan pada tahun kritis di tengah peristiwa yang segera mengubah tatanan kenegaraan dan pikiran di lingkungan masyarakat luas, yaitu peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang oleh penguasa Orde Baru kemudian disebut sebagai G 30 S – 1965. Gerakan itu kemudian dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai ini ditengarai sebagai “dalang” dari gerakan “pemberontakan” itu. Karena itu, selama pemerintahan Orde Baru, gerakan itu ditulis secara resmi di dalam buku-buku—terutama buku sejarah dan ilmu sosial—dengan singkatan G 30 S/PKI. Dengan terjadinya G 30 S/PKI itu, membawa pergantian pemerintahan negara, karena kemudian melalui periode transisi 1966-1967, presiden republik digantikan, yaitu dari Bung Karno ke Jenderal Soeharto yang pada Maret 1967 menjadi pejabat presiden, dan setahun kemudian, 1968, diangkat sebagai Presiden definitif oleh MPRS.

Tentu saja dengan terjadinya perubahan kekuasaan pemerintahan negara itu, terjadi pula perubahan dalam lingkungan Lemhannas. Posisinya berubah ke posisi yang terutama pada tugas-fungsi pendidikan; dan karena itu diawali dengan pendidikan KRA, yang kalau tidak salah, angkatan pertamanya termasuk (alm.) Laksamana Soedomo dan Prof. Dr. Makamina Makagiansar, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi, Depdikbud.

Sesuai dengan perubahan situasi ketika itu, Lemhannas juga mendapat tugas tambahan untuk melakukan kegiatan pendidikan yang disebut dengan penataran. Penataran yang dimaksud ialah Penataran

Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) dan Kursus Calon Dosen (Suscados) untuk perguruan tinggi khusus mata kuliah kewiraan. Namun, tugas utama Lemhannas tetap pada pembekalan kepemimpinan nasional, dengan peserta didik para pejabat pemerintahan, baik sipil maupun militer. Dalam periode reformasi sekarang ini, peserta didik Lemhannas terjadi perubahan, yaitu ada dua kelas, yaitu kelas yang akan mengikuti pendidikan dalam jarak waktu sembilan bulan (PPRA). Mereka yang mengikuti PPRA ini adalah pegawai negeri dan TNI yang sudah menduduki jabatan eselon II. Yang kedua adalah pendidikan singkat (PPSA) yang berjarak waktu lima setengah bulan, dan yang mengikuti pendidikan ini adalah mereka yang sudah menduduki jabatan eselon I. Namun, setelah memasuki periode reformasi, Lemhannas membuka kesempatan pada organisasi-organisasi lainnya, baik organisasi massa maupun organisasi politik, partai politik, untuk turut berpartisipasi mengikuti program-programnya.



Lemhannas di Kekinian

Mungkin sebagian di antara kita—bahkan mungkin mereka yang berada di lingkungan lembaga ini—tidak menyadari adanya perubahan yang amat penting dilihat dari tugas-fungsi Lemhannas, yaitu keterkaitan dengan istilah kursus dan pendidikan. Kedua kata itu memang mempunyai arti yang berbeda. Kata kursus mengacu pada suatu kegiatan dalam waktu singkat dan untuk mendapatkan pengetahuan tanpa kedalaman maknanya. Sebaliknya, pendidikan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan “pengembangan” ilmu pengetahuan, dengan tujuan untuk tidak sekadar pengembangan, melainkan sekaligus dengan pemahaman pendalaman. Dengan demikian, pendidikan sebenarnya tidak hanya menyangkut pada “penambahan” ilmu pengetahuan, melainkan juga berkaitan dengan “kemungkinan” terjadinya perubahan sikap tertentu dari pribadi peserta didik.

Dalam arti itu, orientasi tugas-fungsi Lemhannas dalam periode reformasi tidaklah sekadar memberikan bekal materi ajar kepada peserta didik, melainkan etik sebagaimana yang terkandung di dalam istilah pendidikan itu. Dalam pengertian yang konkret, ketika seorang peserta didik memasuki ruang pendidikan Lemhannas, misalnya bermental korup, setelah menyelesaikan pendidikan di Lemhannas, mental korupsinya itu akan berubah. Kalau tidak menghilangkan mental buruknya itu, paling tidak ia akan mengurangnya, sehingga sebagai pejabat negara, ia dapat mengurangi kerugian negara melalui perubahan sikapnya itu.

Dalam arti itu, lembaga pendidikan yang memang dimaksud untuk melakukan pendidikan kepemimpinan nasional, akan dapat mengemban tugas strategis bagi kelangsungan hidup bersama, sebagai bangsa-negara di hari depan. Pemimpin, kepemimpinan, bagi keberadaan suatu kelompok, mulai dari kelompok yang terkecil sampai yang terbesar (baca : bangsa-negara) merupakan faktor penentu utama. Karena itu, kualitas pemimpin dengan kepemimpinannya akan sangat menentukan keberadaan kelompok itu di tengah-tengah kelompok lainnya. Sejalan dengan itu, ada “perubahan sederhana” yang dilakukan dan dimulai untuk angkatan tahun 2012, yaitu penerimaan calon peserta didik Lemhannas melalui proses seleksi. Kalau cara penerimaan seperti ini dilakukan “secara benar”, paling tidak dalam pendapat saya, itu akan membuat posisi strategis Lemhannas akan lebih berkualitas, karena peserta didik yang diterima memang mempunyai standar kualitas tertentu. Kesungguhan peserta didik untuk mengubah diri setelah menyelesaikan tugas pendidikannya di Lemhannas akan menjadi salah satu ukuran bagi keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan tugas-fungsi yang dibebankan negara kepadanya.

Tantangan di Hari Depan

Keadaan dan perkembangan secara mondial yang serba teknologi dan cepat, memberikan tantangan yang jauh lebih rumit. Namun justru dalam kaitan itulah posisi Lemhannas makin penting-strategis, karena kerumitan situasi yang tentu meminta penanganan secara cerdas itu—untuk melakukan pendidikan pengembangan kepemimpinan nasional. Kerumitan perkembangan di negara kita, sejalan dengan kerumitan perkembangan mondial, menuntut kepemimpinan yang tidak saja cerdas, melainkan juga mempunyai visi jelas yang disertai dengan kerapian program yang realistis dan dapat dijalankan untuk kepentingan seluruh bangsa yang dipimpinya.

Dalam kaitan dengan tantangan mondial di hari depan itu, tidak ada jalan lain selain lingkungan internal Lemhannas sendiri, juga mencipta-kembangkan lingkungan internalnya untuk menghasilkan program-program yang akan semakin memperkuat posisi strategisnya sebagai lembaga pembekal pengembangan kepemimpinan nasional di hari depan!

Sejarawan. Deputi Menteri Bidang Sejarah dan Purbakala, Depbudpar, 2001-2003. Widyaisyawa/Tenaga Profesional di Lemhannas, 1985-sekarang. Pengajar Sejarah Ekonomi dan Bisnis Indonesia di Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atma Jaya, Jakarta, 1984-sekarang. Pengajar Sejarah Pergerakan Nasional dan Sejarah Kontemporer Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, 2003-sekarang. Mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), 2005-sekarang.

47 Tahun Lemhannas RI

Meretas Jalan Menuju Pentas Dunia

Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2006 telah mengamanatkan Lemhannas RI menjadi lembaga berkelas dunia, jalan menuju ke sana masih panjang terbentang.



Memasuki usia 47 tahun pada 20 Mei 2012, Lemhannas RI yang misi utamanya menyiapkan kader kepemimpinan nasional, melakukan pengkajian strategis dan menyelenggarakan program pematapan nilai-nilai kebangsaan sedang meretas jalan menuju Institusi Kelas Dunia (*World Class Institution - WCI*).

Selain berbenah diri dengan melaksanakan 11 Prinsip Pembaharuan Lemhannas, seperti yang diungkapkan Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Ir. Budi Susilo DEA, lembaga yang dipimpinnya sedang terus menyingkirkan 'kerikil-kerikil' lain misalnya mengubah budaya kerja agar "*compatible*" dengan semangat keterbukaan, demokratisasi dan globalisasi saat ini.

Budaya kerja dan paradigma lama, misalnya yang berlangsung pada era sebelumnya yang serba tertutup, tentunya sudah harus disingkirkan di era reformasi dan kebebasan mimbar dan berpendapat saat ini.

Nilai-nilai positif dalam hirarki militer tentu saja masih perlu dipertahankan, namun harus dibarengi dengan kesigapan menyerap teknologi dan merespons tingginya dinamika perubahan, tidak hanya mengedepankan pola-pola instruksional.

11 Prinsip Pembaharuan yang dicanangkan Lemhannas adalah Profesionalisme, *Checks and Balances*, Pendidikan Berkelanjutan, Kebenaran, *Quality Assurance*, Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi, Reformasi, Sistemik, Keseimbangan *Inward-Outward Looking* dan Adaptasi Teknologi.

Sebagai langkah penguatan peran menuju WCI, Lemhannas juga telah menetapkan arah strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain, meningkatkan penataan kehidupan yang lebih baik melalui publikasi karya-karya Lemhannas yang dijadikan landasan monumental, meningkatkan

kompetensi lulusan sebagai sumber daya ideal yang mampu menangani isu-isu strategis nasional.

Langkah lainnya, meningkatkan peran Lemhannas dalam wacana publik, meningkatkan keterlibatan segenap komponen bangsa dalam pembentukan opini, saat pusat kekuasaan bergeser dari *state-centered* ke *people-centered*, memastikan kurikulum dan kajian yang *up to date* dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta meningkatkan upaya untuk membangun karakter bangsa yang memiliki kepercayaan pada kekuatan sendiri yang mengarah pada kemandirian bangsa.

Pengakuan terhadap lembaga ini, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepanji DEA, tentunya harus diberikan oleh pihak luar, bukan oleh Lemhannas. "Pengakuan harus diberikan oleh pihak lain, bukan Lemhannas yang memberi penilaian, dan untuk menjadi Institusi Kelas Dunia, ada indikatornya," kata Budi Susilo.

Indikatornya antara lain, jika lebih banyak lagi peserta dari negara-negara lain untuk mengikuti program pendidikan di Lemhannas, karena kehadiran mereka menjadi bukti kepercayaan pada institusi ini.

Kehadiran peserta asing diperlukan untuk membangun kepercayaan terhadap Lemhannas

(Confidence Building Measure - CBM), sementara gagasan atau ide orisinal yang ditampilkan dalam program pendidikan di Lemhannas akan bisa menjadi magnet yang akan mendorong minat calon peserta dari negara sahabat untuk "berguru" di Lemhannas.

Keanekaragaman khazanah budaya dan kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia, menurut dia, juga bisa menjadi daya tarik untuk diangkat dalam program pendidikan Lemhannas sebagai upaya menuju Institusi Kelas Dunia.

Sementara mantan Orang Nomor 1 di Lemhannas, Prof. Dr. Muladi SH berharap, Lemhannas bersama dengan institusi lainnya, harus mampu menjadi sumbu dan kekuatan penggerak (driving force) bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

Namun tentunya, Lemhannas harus berani mengambil inisiatif, tidak hanya menunggu, apalagi bergantung pada pihak lain. Siap atau tidak siap, tidak boleh tidak, kedudukan Lemhannas sebagai Institusi Kelas Dunia harus diraih, mengingat usia Lemhannas yang sudah cukup panjang sebagai lembaga pencetak kader pemimpin dan pengkajian.

Salah seorang alumni Lemhannas, Tritamtomo berpendapat, Lemhannas harus memiliki "greget" dan mampu "menggebuk" dalam kajian-kajian yang disampaikan kepada pemerintah seiring dengan semakin tingginya dinamika dan tuntutan masyarakat di era reformasi dan keterbukaan saat ini.

Berangkat dari saat didirikannya, Lemhannas dibentuk di tengah eskalasi politik global di era Perang Dingin pada dekade 60-an yang ditandai dengan pertarungan ideologi liberal dan komunis yang juga berdampak secara nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

RI yang usianya masih relatif muda saat itu mengalami instabilitas politik dan kemerosotan ekonomi,

sementara sistem politik liberal dengan multi partai yang diterapkan malah dijadikan ajang persaingan antar elit partai untuk berebut kekuasaan sehingga muncullah berbagai konflik yang berujung dengan jatuhnya kabinet.

Terbelit kesulitan ekonomi, gangguan keamanan bermunculan, baik karena ketidakpuasan suatu kelompok terhadap pemerintah pusat maupun aksi separatisme, bahkan muncul pula konspirasi untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi yang berlandaskan agama atau komunis.

Situasi tersebut meresahkan sejumlah perwira tinggi staf keamanan nasional karena dikhawatirkan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, cepat atau lambat akan mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka tidak rela, NKRI yang didirikan dan dipertahankan dengan korban jiwa, akan runtuh akibat berbagai praktek penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi.

Ide pembentukan Lemhannas kemudian muncul pada Seminar Seskoad, dengan pemikiran, pentingnya kehadiran suatu lembaga untuk menunjang kesiapan perang guna mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.

Lemhannas resmi berdiri pada 20 Mei 1965 walaupun dalam tataran ide, Lembaga ini sudah digagas sejak 1962. Momentum Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei sengaja dipilih sebagai hari kelahirannya untuk merefleksikan watak dasar dan karakter lembaga yang khas Indonesia dalam koridor nuansa kebangsaan atau nasionalisme Indonesia.

Dalam perjalanannya kemudian, Lemhannas mengalami pasang-surut seiring dengan situasi politik dan pergantian pucuk pimpinan nasional. Lemhannas mengalami pasang-naik di era pemerintahan Presiden Soeharto dilihat dari kualitas output pemikiran yang dihasilkan seperti konsep

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang menjadi acuan dan masukan dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Namun kemudian, peran Lemhannas memudar saat Indonesia memasuki era euforia reformasi yang dibarengi dengan terjadinya krisis multidimensi di berbagai aspek kehidupan. Lembaga ini tidak lagi menghasilkan karya-karya monumental berbentuk kajian seperti yang dilakukan sebelumnya.

Masyarakat saat itu tidak merasakan lagi kehadiran Lemhannas yang sebelumnya mampu menghasilkan hasil telaahan yang strategis dan mendasar. Ungkapan "Quo vadis Lemhannas" yang dilontarkan masyarakat dinilai cukup beralasan karena mereka tidak bisa lagi menikmati kajian-kajian yang monumental.

Bahkan Wapres saat itu, Megawati, dengan nada tajam menyitir ekspresi kerinduan masyarakat terhadap peran Lemhannas seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. "Jangan heran, bila suatu saat nanti masyarakat menghendaki Lemhannas dibubarkan," tutur Megawati.

Setelah sempat bergonta-ganti penanggungjawabnya, dari presiden ke Pangab, kemudian Menhankam/Pangab, setelah itu ke Menhankam lagi akibat reorganisasi Dephankam yang dipisah dengan Mabes TNI, dan terakhir, berdasar Peraturan Presiden No. 67 tahun 2006, Lemhannas menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggungjawab pada presiden.

Kepanjangan Lemhannas sendiri sudah diubah dari semula, Lembaga Pertahanan Nasional menjadi Lembaga Ketahanan Nasional seiring dengan perubahan paradigma spektrum potensi ancaman terhadap kedaulatan negara yang tidak hanya berupa ancaman militer semata tetapi juga dari berbagai aspek lainnya.

Untuk menjadi Institusi Kelas Dunia, Lemhannas sedang

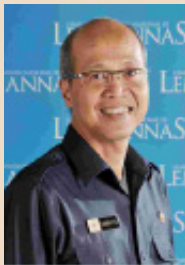
berbenah diri dengan melakukan langkah-langkah strategis berupa Sebelas Prinsip Pembaharuan yakni profesionalisme, checks and balances, pendidikan berkelanjutan, kebenaran, quality assurance, efisiensi dan efektivitas, transparansi, reformasi, sistemik, keseimbangan inward-outward dan adaptasi teknologi. Upaya lainnya berupa revitalisasi dan restrukturisasi organisasi, reformasi birokrasi, penguatan 'capacity building' dan pengembangan jaringan kerja.

Di tengah-tengah merosotnya nilai-nilai kebangsaan, potensi ancaman disintegrasi dan anarki akibat euforia kebebasan serta meruaknya praktik korupsi yang merusak segenap sendi-sendi bangsa dan negara saat ini, tentunya masyarakat juga berharap agar Lemhannas lebih "membumi" dalam kajian-kajiannya.

Walaupun tidak hanya menjadi tanggungjawab Lemhannas, upaya untuk menciptakan kader-kader pemimpin bangsa yang akan terbebas dan tahan godaan terhadap berbagai penyimpangan khususnya praktik korupsi mungkin perlu ditekankan lagi di dalam kurikulum pendidikan dan kajian di lembaga ini.

Begitu pula dengan potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI yang bisa saja timbul akibat rantai kemiskinan yang belum terentaskan, kesenjangan atau disparitas kesejahteraan masyarakat, tuntutan keadilan atau persamaan hak, begitu pula akibat ulah atau kesewenang-wenangan oknum aparat.

Cukup banyak "PR" yang harus dikerjakan dan jalan panjang yang harus diretas Lemhannas untuk menjadi Institusi Kelas Dunia, dengan mewujudkan komitmen-komitmen yang sudah dibuat dan yang tidak kalah pentingnya dituntut kerja keras segenap jajarannya. Selamat HUT ke-47 Lemhannas RI.



Mendambakan Gedung 21 Lantai

Dr. Chandra Manan Mangan M.S.
Sekretaris Utama Lemhannas RI

"Saya membayangkan, mimpi Lemhannas untuk memiliki gedung berlantai 21 bisa diwujudkan, mengingat sarana gedung sangat diperlukan dalam upaya menuju Institusi Kelas Dunia," kata Sekretaris Utama Lemhannas RI, Dr. Chandra Manan Mangan M.Si. Menurutnya, saat ini antara tugas yang dibebankan kepada Lemhannas dengan fasilitas yang tersedia tidak imbang. Beban Lemhannas RI semakin berat dengan adanya permintaan untuk menyelenggarakan pendidikan misalnya bagi walikota, bupati, DPRD di seluruh Indonesia dan juga berbagai pejabat instansi lainnya.

Di bidang pendidikan, Lemhannas antara lain menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) selama 42 minggu dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) selama 12 minggu. Biasanya, menurut Chandra, setiap tahun diselenggarakan masing-masing satu program PPRA (80 peserta) dan PPSA (50 peserta). Baru pada 2012, diselenggarakan dua program PPRA dan satu program PPSA.

Mengenai SDM, Chandra menuturkan, saat ini terdapat 800 pegawai termasuk 625 pegawai tetap, dari segi pendidikan 58 persen tamatan SMA, padahal berdasarkan program Reformasi Birokrasi di lembaga itu, jumlah 400 pegawai dinilai sudah cukup, sehingga separuhnya bisa dipangkas.

Kadang-kadang, menurut Chandra, pihaknya juga kesulitan

untuk memperoleh tenaga dengan kompetensi tertentu dari institusi TNI maupun Polri.

Dari sisi anggaran, Sekretaris Utama Lemhannas itu mengemukakan, terjadi lonjakan luar biasa dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diterima pada 2011. Pada tahun 2011, Lemhannas mendapatkan alokasi anggaran dari DIPA sebesar Rp.190,35 miliar, sedangkan tahun 2012 Rp. 239,5 miliar atau terjadi kenaikan sekitar 25 persen. "Ya kalau dilihat kenaikannya, cukup besar. Tapi jika dilihat tuntutan kebutuhan, masih kurang," tuturnya.

Mengenai kualitas Lemhannas RI saat ini, katanya, fakta menunjukkan bahwa siswa program pendidikan Lemhannas RI berdatangan dari 20 negara, sementara kajian yang dilakukan tidak saja menyangkut isu nasional, tetapi juga regional dan global.

"Belum ada alumni Lemhannas yang jadi menteri atau pejabat tinggi dimaki-maki dalam rapat kerja atau dengar pendapat di DPR," kata Chandra, menunjukkan salah satu indikator, alumni Lemhannas cukup kredibel dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Di bidang perangkat komunikasi dan peralatan IT, saat ini Lemhannas juga bekerja sama dengan Spanyol. "Ya kita kerja saja sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, nanti apakah kita sudah menjadi Institusi Kelas Dunia, pihak luar terutama pengguna yang akan menilai," kata Chandra menambahkan.

Lemhannas Harus Mampu Jadi Penggerak Demokrasi

Lemhannas adalah lembaga independen, walaupun juga merupakan lembaga milik pemerintah, tetapi memiliki independensi dalam segi moralitas dan intelektualitas untuk membangun kejujuran, kebebasan dan kultur akademis



Prof. Dr. Muladi

Lemhannas bersama dengan institusi lainnya harus mampu menjadi sumbu dan kekuatan penggerak (driving force) pembangunan demokratis Indonesia, kata mantan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi. "Kita harus mengambil inisiatif. Tidak boleh menunggu. Apalagi bergantung pada pihak lain," kata Muladi menyampaikan harapannya dalam HUT ke-47 Lemhannas RI pada 20 Mei, 2012.

Mengenai langkah Lemhannas RI untuk menjadi Institusi Kelas Dunia (*World Class Institution - WCI*) pada 2025, Muladi berpendapat,

sebagai institusi yang cukup panjang usianya (didirikan oleh Bung Karno pada 1965) memang sepiantasnya sasarannya harus ke sana. "Siap atau tidak siap, tidak boleh tidak kedudukan Lemhannas sebagai Institusi Kelas Dunia harus diraih," tandasnya seraya menambahkan, cita-cita tersebut sudah dikumandangkan sejak saat ia memimpin Lemhannas (2005 - 2011).

Muladi menegaskan, Lemhannas adalah lembaga independen, walaupun juga merupakan lembaga milik pemerintah, tetapi memiliki independensi dalam segi moralitas dan intelektualitas untuk membangun kejujuran, kebebasan dan kultur akademis. Namun tentu saja, menurut dia, sejumlah "PR" harus dilakukan oleh Lemhannas mulai dari pembenahan struktur organisasi, rekrutmen tenaga profesional termasuk tenaga pengajar dan pengkaji jika ingin menggapai WCI.

"Sebagai lembaga pendidikan 'bergengsi' yang juga mengemban misi melakukan analisis strategis, Lemhannas RI harus awas terhadap setiap perkembangan terkini kehidupan nasional dan permasalahan yang dihadapi bangsa," ujarnya. Lemhannas RI, lanjutnya, harus mampu "menjual" kajian-kajian

yang dihasilkan, dalam artian bahwa kajian harus disampaikan kepada pemerintah dengan cepat dan tepat sesuai perkembangan lingkungan strategis, baik di dalam negeri, regional maupun global.

Jadi, sambung Muladi, pengembangan profesionalisme staf pengajar dan pengkaji merupakan hal teramat penting karena jika Lemhannas dinilai tidak peka atau tanggap terhadap permasalahan bangsa, wibawa institusi ini bisa anjlok. Muladi menilai, materi pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan pada peserta program pendidikan di Lemhannas merupakan bekal penting bagi calon-calon pemimpin di masa depan tersebut.

"Kesetiaan pada UUD 1945, Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa ditawar dan merupakan syarat mutlak bagi seorang pemimpin," tegasnya. Muladi juga berharap, setiap kader bangsa lulusan program pendidikan di Lemhannas RI memiliki sikap demokratis, leadership yang mumpuni, berpikir sistemik sehingga menjadi pemimpin yang unggul di masa depan.

Kajian Lemhannas Harus “Menggebuk”

Tindak kekerasan seolah-olah dihalalkan. Penyebabnya bisa jadi karena ada kelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak mendapat ‘tempat’.



Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo.
Anggota DPR RI

Lemhannas RI ke depan harus memiliki “greget” dan mampu “menggebuk” dalam kajian-kajian yang disampaikan kepada pemerintah seiring dengan semakin tingginya dinamika dan tuntutan masyarakat di era reformasi dan keterbukaan saat ini, kata salah seorang alumninya, Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo. “Sebaliknya, pemerintah tentu juga harus mendengar kajian yang disampaikan Lemhannas,” ujar Tritamtomo di Jakarta, Jumat, berkaitan dengan HUT ke-47 Lemhannas yang akan diperingati pada 20 Mei.

Salah satu tugas utama Lemhannas RI adalah melakukan

kajian konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan bangsa, regional dan internasional yang diperlukan presiden guna menjamin keutuhan dan tegaknya NKRI. Dengan “stakeholders” bangsa lainnya, Lemhannas RI, menurut Tritamtomo, juga secara rutin menyelenggarakan diskusi “roundtable” untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan terkini untuk selanjutnya digodog sebagai bahan kajian yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Mantan Pangdam Bukit Barisan itu mengakui, kondisi bangsa saat ini cukup memprihatinkan. “Tindak kekerasan seolah-olah dihalalkan. Penyebabnya bisa jadi karena ada kelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak mendapat ‘tempat’, sehingga melampiaskan kekecewaan mereka dengan melanggar hukum,” tuturnya.

Para pengajar di Lemhannas, kata Tritamtomo, biasanya memberikan “potret” permasalahan kekinian bangsa yang muncul untuk dibahas, didiskusikan untuk dirumuskan konsep pemecahannya. Lemhannas, menurut dia, juga memiliki kebanggaan karena sejak era-era sebelumnya dipercaya dan terbukti telah mampu menelorkan sejumlah pimpinan nasional.

Ke depannya, Tritamtomo berharap agar Lemhannas memberikan kesempatan yang lebih luas lagi pada anak-anak bangsa dari seluruh tumpah darah Indonesia.

Menurut Tritamtomo, Lemhannas RI diikuti oleh peserta dari negara lain. Terutama dari negara-negara anggota ASEAN sehingga para alumninya yang tersebar dan juga kini banyak yang memiliki posisi penting di negara mereka masih memiliki ikatan kebersamaan dengan almamaternya. “Meningkatnya animo peserta asing merupakan bukti pengakuan mereka terhadap kualitas program pendidikan di Lemhannas RI,” ujar Tritamtomo.

Dengan demikian, diharapkan apa yang mereka pelajari saat mengikuti program pendidikan di Lemhannas termasuk penyelesaian solusi melalui pendekatan kultur atau budaya Indonesia, akan diterapkan di negeri mereka masing-masing. “Ini pada gilirannya juga bisa membentuk citra positif bagi ketokohan Indonesia paling tidak di kawasan regional ASEAN,” tuturnya.



DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si
Sekretaris Dewan Pengarah
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia

Membangun TRUST untuk Mendapat Dukungan

Target Lemhannas untuk mencapai penilaian sebagai institusi kelas dunia (*World Class Institution*); merupakan respons terhadap tuntutan kondisi dan tantangan dinamika perkembangan lingkungan strategis Nasional, Regional dan Global, telah digagas oleh Presiden Republik Indonesia Bapak DR. Susilo Bambang Yudhoyono yang esensinya secara monumental tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tanggal 13 Juni 2006.

Yang paling penting untuk mewujudkan World Class Institution adalah legitimasi berupa pengakuan dari masyarakat atau Institusi Internasional, Kata Sekretaris Dewan Pengarah Lemhannas RI DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si

Jadi menurutnya, upaya untuk membangun "Trust" atau kepercayaan adalah prioritas utama yang harus dilakukan oleh Lemhannas karena tanpa "Trust" sulit untuk

mendapat pengakuan dan dukungan dari berbagai pihak, yang selama ini terus menerus dilakukan Lemhannas RI untuk penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia menuju institusi kelas dunia.

Untuk mencapai kedudukan sebagai Institusi Kelas Dunia, Lemhannas melakukan persiapan dengan 11 Prinsip Pembaharuan yakni profesionalisme, *checks and balances*, pendidikan berkesinambungan, kebenaran dengan menegakkan integritas intelektual, kebebasan dan budaya akademi, jaminan mutu, efisiensi dan efektivitas, transparansi, reformasi, sistemik, keseimbangan "inward-outward looking" dan adaptasi teknologi.

Saat ini Lemhannas telah merumuskan Key Performance Indicator (KPI), kriteria World Class Institution (WCI), menginventarisir dukungan infrastruktur fisik dan non fisik.

Keinginan untuk menjadikan Lemhannas menuju World Class Institution yang diutarakan Presiden Republik Indonesia Bapak DR. Susilo Bambang Yudhoyono saat melantik Prof. DR. Budi Susilo Soepandji DEA sebagai Gubernur Lemhannas RI dan ditekankan kembali untuk percepatannya pada tanggal 5 Agustus 2011

Menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2006 tersebut dibentuk Dewan Pengarah yang berkedudukan sejajar dengan Gubernur, Tugas dan Fungsinya Dewan Pengarah yakni merumuskan Kebijakan Umum Lemhannas RI di bidang : Pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional; Pengkajian Strategik berbagai permasalahan nasional dan internasional; Pementapan nilai-nilai kebangsaan; Kerjasama pendidikan pascasarjana di bidang studi strategis ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan tingkat nasional dan/ atau internasional; Kerjasama pengkajian strategis dengan institusi di dalam dan luar negeri.

Dewan Pengarah keanggotaannya sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, sembilan orang yakni : Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji DEA,

sebagai Koordinator merangkap anggota, DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si sebagai Sekretaris merangkap anggota, Menko Polhukam sebagai anggota (ex officio), Menko Perekonomian sebagai anggota (ex officio), Menko Kesra sebagai anggota (ex officio), Ketua Umum KADIN sebagai anggota (ex officio), Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso sebagai anggota, Jenderal Polisi (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM sebagai anggota dan Prof. Dr. Juwono Sudarsono MA sebagai anggota.

Mengenai patokan pencapaian kelas dunia pada 2025, Ardi berpendapat, dengan komitmen segenap jajaran Lemhannas yakin hal itu akan dapat diwujudkan, bahkan dengan "trust" yang terus dibangun untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari berbagai pihak, bisa diraih dalam waktu lebih singkat lagi.

Selain Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas juga menyelenggarakan Forum Konsolidasi (Forkon) bagi Gubernur, Bupati/walikota dan pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Melaksanakan Training of Trainers (ToT) serta pementapan nilai-nilai kebangsaan bagi segenap komponen bangsa (Suprastruktur politik, Infrastruktur politik dan Substruktur Politik).

Sejak tahun 2009 Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas telah diikuti oleh 42 peserta negara sahabat dari 22 negara, saat ini Lemhannas terus melakukan pengembangan yang dilandasi oleh pendekatan historis, filosofis, yuridis, politik dan sosiologis.

Pada bagian lain, mengenai berbagai penyimpangan yang terjadi dan berbagai kasus yang mengindikasikan turunnya nilai-nilai kebangsaan, Ardi mengemukakan, Lemhannas juga sangat 'concern' untuk mencegah perilaku tersebut.

Menggapai Kelas Dunia dengan Kajian Konsepsional dan Strategis



Irjen Pol. Herry Haryanto
Deputi Pengkajian Strategik
Lemhannas RI

Pengkajian adalah kegiatan ilmiah (*scientific*) yang diselenggarakan berdasarkan prinsip keilmuan dengan syarat, standar, prosedur, keluaran, hasil, manfaat, dampak yang terukur dan teruji serta bersifat universal yang melibatkan berbagai kepakaran untuk mewujudkan kehidupan dan lingkungan yang semakin baik. Saat ini, kegiatan pengkajian yang dilaksanakan oleh Kedepuitan Pengkajian Strategis Lemhannas RI berupaya memenuhi segenap syarat dan standar tersebut.

Konsekuensi dari tantangan tersebut adalah melakukan perubahan secara gradual yang

meliputi faktor input dan proses untuk menghasilkan keluaran dan hasil kajian yang berkelas dunia melalui transformasi secara konsisten dan konsekuen. Prosesnya bersifat konsepsional dan strategis melalui reformasi birokrasi yang difokuskan kepada empat aspek yaitu tenaga pengkaji yang kompetitif, proses pengkajian yang aspiratif, keluaran dan hasil kajian yang aplikatif, manfaat dan dampak kajian yang akomodatif.

Lemhannas RI setiap tahun melaksanakan 15 - 25 kajian dalam jangka waktu 3 - 4 bulan untuk setiap kajian. Pada tahun 2012, Kedepuitan Pengkajian Strategis melaksanakan 15 kajian terdiri dari 5 kajian berlanjut dan 10 kajian aktual yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengkajian Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan dan Internasional. Idealnya, Lemhannas RI dapat melaksanakan 12 kajian berlanjut dengan 3 lokus yang hierarkis untuk setiap kajian dan 24 kajian aktual untuk merespons dan mengantisipasi persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu meningkatkan keterlibatan pakar dari institusi pendidikan tinggi dan

lembaga non pemerintahan yang terikat perjanjian kesepahaman dengan Lemhannas RI. Lembaga perlu melakukan kegiatan kajian bersama dengan kelembagaan pemerintah dan pemerintahan daerah serta berbagai organisasi yang perhatian kepada upaya memantapkan ketahanan nasional bagi terwujudnya stabilitas nasional sekaligus keadilan sosial yang berkesinambungan.

Meretas jalan menuju pentas dunia melalui kajian bersifat konsepsional dan strategis suatu keniscayaan bagi Lemhannas RI yang kredibel, responsibel, reputabel dalam transformasi menuju lembaga berkelas dunia yang meliputi konsepsi dan substansi sesuai dengan standar global. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga kajian strategis di berbagai dunia dapat menjadikan lembaga semakin terpacu untuk mencapai kelas dunia secara menyeluruh mulai dari kompetensi aparatur pengkajian sampai kepada kualitas hasil kajiannya.



Laksma Santoso
Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

Menumbuhkan Kembali Karakter Bangsa

Perlu kita ingat, pembangunan karakter bangsa merupakan tugas bersama. Tugas seluruh anak bangsa.

Perjalanan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan selama hampir 70 tahun seharusnya menjadikan bangsa Indonesia lebih dewasa. Namun gejolak masyarakat terjadi dimana-mana dan konflik horisontal masih terjadi. Bahkan terdapat peluang bagi masyarakat untuk tidak berpedoman pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Nama Pancasila semakin asing di telinga para generasi muda. Bahkan terdapat beberapa sekolah yang melarang muridnya menghormati lambang negara, diantaranya adalah bendera. Akibatnya ialah melemahnya

pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila bagi seluruh komponen masyarakat, memberikan peluang berkembangnya ideologi lain seperti liberalisme, kapitalisme dan bahkan tidak mustahil munculnya kembali ideologi komunisme di Indonesia. Akibat yang lebih memprihatinkan adalah jika bangsa yang multikultural ini lemah dalam wawasan kebangsaan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, hampir seluruh komponen bangsa menghendaki perlu digalakkannya kembali pembangunan karakter bangsa. Bahkan beberapa Lembaga/Instansi

telah menyusun rencana mendirikan sekolah-sekolah kebangsaan dan menyusun grand design tentang wawasan kebangsaan sebagai reaksi atas keprihatinan mereka. Perlu kita ingat, bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan tugas bersama. Tugas seluruh anak bangsa.

Untuk menjangkau pembangunan karakter bangsa yang luas, menyentuh seluruh komponen masyarakat, seluruh anak bangsa, yang dilaksanakan dalam sistem politik Indonesia, perlu disusun grand design yang dapat mewadahi seluruh tugas siapa berbuat apa, dimana, serta dengan cara bagaimana secara detail. *Grand design* yang dibuat disesuaikan dengan sistem politik Indonesia, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai payung hukum yang dapat mengikat seluruh komponen masyarakat.

Selain sistem politik, dalam *grand design* perlu dipertimbangkan pula sistem sosial yang ada sehingga jangkauan operasionalnya dapat benar-benar menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Drs.H. Nursal Luth, M.M dan Drs. Daniel Fernandez, MA dalam buku sosiologi menyatakan bahwa jenis-jenis media sosialisasi pada masyarakat antara lain masyarakat lingkungan keluarga, pendidikan, pemerintahan, swasta, ormas/orsospol dan media massa.

Karakter bangsa perlu terus dibangun, sesuai kata bijak bahwa: *"Character Building is a Never Ending Process"*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa selama NKRI ini masih ada dan agar tumbuh menjadi bangsa berkarakter, diperlukan pembangunan karakter secara terus menerus.



Membangsa Indonesia

Oleh : Prof. Muji Sutrisno, SJ

Pengertian bangsa sebagai “nation” dengan kesamaan teritori tanah air; dengan kesatuan rasa dan hasrat tampil merdeka dalam identitas kemajemukan suku agama. Namun, jika menyatu untuk secara politis menjadi sebuah negara berdaulat, dengan kepastian hukum dan demokrasi sebagaimana diproklamasikan 17 Agustus 1945 merupakan proklamasi politis dalam permakluman kemerdekaannya dari penjajahan. Wujudnya adalah sebuah negara berdaulat RI, yang secara politis internasional diakui merdeka dan berdaulat. Namun secara kultural masih berproses karena loncatan politis tidak serta merta bersamaan dengan proses budaya (baca: saling osmosis merajut hormat pada perbedaan sebagai kekayaan bhinneka yang terus diproses menjadi jika tetapi keikaan tidak pernah boleh menjadi penyeragaman). Dengan kata lain, pengertian “bangsa” dan pergulatannya sesungguhnya merupakan pengertian budaya atau kultural.

Lalu pada saat momentum yang “tak mungkin berbalik kembali” karena kesadaran diberkati oleh berkah Allah yang Maha Kuasa ini, maka tampillah religiusitas keIndonesiaan. Pengertiannya amat dalam dan padat serta merangkum ciri utama kebudayaan bangsa: kesadaran akan Yang Illahi. Sebagai sumber dan acuan hidup berbangsa, kesadaran bahwa kemanusiaan dan keadilan merupakan perajut dalam keragaaman ketika bersamaan tampil di depan hukum. Sementara keadilan menjadi bahasa ekonomis pemerataan, hukum dan keadilan serta kesejahteraan bersama, menjadi bahasa cita-cita mewujudkan struktur hidup bersama sebagai bangsa yang beragam dan majemuk. Ini semua tergumpal dalam preambule konstitusi 1945, baik kalimat syukur kemerdekaan serta alinea 4. Dimana Pancasila menjadi rangkuman proses membangsa

Indonesia. Inilah kemauan untuk menjadi bangsa yang berkeadaban, saling menghormati harkat sesamanya, yang secara politis berupa proklamasi merdeka. Secara kultural, berupa janji untuk memproses keadilan, keadaban, dan kesejahteraan bersama sebagai bangsa. Jadi perekat “pasca proklamasi kemerdekaan” adalah upaya terus menerus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Maka, ketika dekade ini, terutama setelah mengalami “hasil positif” janji dan perekat membangsa Indonesia ini dalam “reformasi pasca 1998”, dalam wujud tanda petik besar demokrasi politik. Maka, krisis “distrust” mengundang refleksi mendalam kita mengenai ‘mengapa’-nya. Pertama, dalam sejarah membangsa bangsa lain dalam perbandingan untuk bercermin, proses demokrasi politik harus jatuh bersamaan dengan demokrasi ekonomi. Mengapa? Karena orang tak bisa demo mengungkap hak-haknya jika persoalan pokok mengenai kebutuhan perut tidak ada. Orang juga sulit teriak dalam kondisi lapar atau menganggur.

Distrust terjadi karena ketidakadilan menganga. Jurang antara orang miskin dan orang kaya yang korup sangat paradoks dan kontras. Gedung sekolah yang reyot berdampingan dengan gedung wakil rakyat yang penuh fasilitas. Sebuah karikatur menggugat dengan anekdot, dimana dalam penjenjangan orang selalu berjuang dari wakil rektor menjadi rektor. Dari wakil presiden ingin menjadi presiden, dari wakil direktur mau menjadi direktur. Namun mengapa dari “wakil rakyat” hampir semua mengingkari untuk menjadi “rakyat”?

Kedua, distrust terjadi lantaran tak adanya pemihakan pada rakyat dalam konflik antara pemodal, masyarakat dalam hal ini rakyat dan “negara”. Hutan dan tanah ulayat diambil alih oleh para pemodal global yang



bersekutu dengan negara. Untuk perkebunan ekspor, tanpa keterbukaan legal dan tanpa rundingan dengan para pemiliknya, mengakibatkan munculnya kekerasan akibat konflik tanah. Dimana aparaturnya dan negara berpihak?

Lalu apa sebenarnya persoalan akarnya, sehingga muncul "indikasi tidak berhasil atau gagal" dalam memberi kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat? Yang pertama, karena ekonomisasi kapitalistik dan bukan populis seperti cita-cita Bung Hatta. Itulah yang "de facto" dijalankan dalam pembangunan. Yang kedua, moralitas mengagungkan dan memuliakan kehidupan antar sesama, dengan alam dan dengan Yang Ilahi telah dikhianati oleh penghayatan keserakahan dan kesewenangan karena harus membayar rente. Maka terjadilah pengambilan sebanyak-banyaknya untuk ego sendiri atau kelompok. Jadilah gaya hidup "egolologi": Semua-semuanya untuk "ego" sendiri tanpa peduli sengsara dan derita sesama.

Yang ketiga, muncul dalam refleksi-refleksi diskusi, mengenai proses membangun kita. Sebuah "batu uji" untuk mengukur kita semua. Yaitu, ketika Anda memegang sebuah "wewenang yang memuat sebuah tanggung jawab sosial", akan Anda perlakukan sebagai apakah wewenang tersebut? Anda perlakukan sebagai tugas "pelayanan atau amanah" untuk kesejahteraan membangun Indonesia kita? Atau seperti yang meruyak dan merajalela dijalankan oleh kita semua yang memperlakukannya sebagai KUASA, yang memakai dan memanfaatkan sebanyak mungkin untuk kepentingan memperkaya kita sendiri?

Sebuah penelitian sedang dicoba dirancang mengenai apa yang dipersepsi tentang "tugas dan tanggung jawab". Fenomena indikatornya,

jelas-jelas bersalah dan secara publik bersalah, namun tak pernah ada contoh mengakui bersalah dengan mengundurkan diri karena mau bertanggungjawab. Yang ada adalah janji di depan dengan orasi gagah, bila program X atau Y gagal nanti saya akan mundur. Namun, meski jatah waktu telah lewat pun, tak juga ada yang mundur. Lantas apa makna "tanggungjawab"?

Akhirnya, yang paling menjadi jalan keluar jangka pendek dan panjang adalah "keteladanan". Sebab satu tindak keteladanan itu berharga. Lebih dari seribu kata kotbah dan orasi. Dalam pepatah kuno kebijaksanaan hidup, sebuah contoh itu menghidupi laku ke depan buat anak cucu. Sementara kata-kata tanpa tindakan adalah tong kosong berbunyi nyaring yang habis ditelan angin. Proses membangun Indonesia adalah proses cultural. Mulai dari pembatiran dan penanaman, mengenai "apa yang baik" (ethos dan etika); "apa yang benar" (kejujuran nurani dan budi) dan "apa yang indah" (memuliakan keindahan hidup dan estetika nyanyi, tari dan kidung berkidung) yang merupakan jalan bertahap. Tapak demi tapak, penuh keringat dan perjuangan, seperti merajut kain songket. Dengan hati sama, seperti meditasi membuat batik tulis dengan prosesnya yang butuh ketekunan. Dan bukan seperti membuat batik cap, yang sekilat jadi atau "instantly" meski mungkin laku dijual.

Penulis adalah Budayawan.



M. Hatta Rajasa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Harapan pada 47 Tahun Kiprah dan Pengabdian Lemhannas RI

Di tahun 2012 ini, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) genap memasuki usianya yang ke-47. Selama hampir setengah abad, Lemhannas, sebagai lembaga kajian dan analisis, telah mencetuskan sejumlah gagasan strategik yang ikut berkontribusi memajukan kehidupan berbangsa. Beragam kajian, telaah dan analisis yang dikembangkan Lemhannas telah banyak diserap, dijadikan referensi, hingga diterapkan oleh beragam institusi pemerintahan, kalangan dunia usaha, organisasi massa maupun organisasi politik.

Sebagai lembaga pendidikan, Lemhannas telah memfasilitasi proses peningkatan dan perluasan kapasitas pengetahuan serta pembentukan pola pikir yang makin terstruktur bagi para pimpinan tingkat nasional dari berbagai kalangan. Di kalangan pemerintah pusat dan daerah, alumni Lemhannas berkontribusi konstruktif pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan nasional sesuai tuntutan pembangunan pada eranya masing-masing. Di kalangan TNI dan Polri, para alumni menjadi komponen terpenting dalam program pembinaan profesionalisme yang telah meningkatkan kualitas kinerja kedua institusi itu dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanat konstitusi. Demikian pula di kalangan politisi, dunia usaha, organisasi massa dan organisasi kepemudaan, alumni Lemhannas telah berperan aktif meningkatkan peran organisasi-organisasi itu sebagai pilar-pilar utama pembangunan masyarakat madani yang demokratis.

Performa kelembagaan yang sangat mengesankan itu makin memperkokoh reputasi Lemhannas sebagai lembaga pendidikan dan kajian strategik yang prestisius di tanah air. Tentu saja kinerja yang telah terbina dengan baik selama ini, harus terus ditumbuhkembangkan serta disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik di lingkup nasional, regional hingga global.

Lemhannas dan Tantangan Global Masa Depan

Sejatinya tantangan utama yang dihadapi Lemhannas di saat ini hingga ke depan nanti, adalah pada pemantapan perannya sebagai komponen bangsa yang ikut merancang pembangunan peradaban yang makin maju - *planning for advanced civilization* -.

Pada ranah ekonomi, pembangunan peradaban yang makin maju itu, antara lain, dicirikan dengan kesanggupan kita dalam mengelola kegiatan ekonomi yang makin mengedepankan perluasan potensi kemanusiaan melalui pembudidayaan kreativitas dan daya inovasi didukung peningkatan konektivitas guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang makin adil dan makin berkelanjutan - *fair and sustainable welfare* -.

Perpaduan antara pembudidayaan kreativitas dengan keberadaan konektivitas meningkatkan efektivitas penyaluran berbagai hasil kegiatan ekonomi yang mempercepat pengetasan kemiskinan - *reversing poverties* -, memperbesar peluang pemberdayaan masyarakat, memperluas akses kesehatan dan pendidikan, mendukung stabilisasi dan pemerataan populasi penduduk - *stabilizing population growth* - serta mempermudah perluasan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.

Perpaduan pembudidayaan kreativitas dengan konektivitas itu, juga kita harapkan dapat memfasilitasi interaksi antarbangsa yang makin intensif, dan diharapkan pula akan menjamin terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional dari ancaman kejahatan transnasional, terorisme hingga terjadinya perang total (*all-out war*).

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan kegiatan ekonomi yang dimaksud, pemerintah sejak Mei 2011 telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 atau

MP3EI. Guna mensinergikan kegiatan ekonomi dengan upaya pengentasan kemiskinan, MP3EI itu telah disinkronisasikan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia atau MP3KI.

Insy Allah, bila MP3EI dan MP3KI dapat terlaksana dengan lancar, kesejahteraan yang berkelanjutan pada lingkup nasional dapat segera kita capai. Dengan postur negeri kita sebagai negara keempat terbesar di dunia, pencapaian kesejahteraan masyarakat kita merupakan kontribusi luhur bangsa Indonesia bagi pemajuan pembangunan kemanusiaan di lingkup global.

Sebagai bagian dari pelaksanaan upaya itu, pada lingkup penyelenggaraan pendidikan, Lemhannas antara lain diharapkan untuk terus menyempurnakan desain kurikulum dan program pendidikan yang mampu mencetak lulusan andal yang tidak saja berwawasan luas, namun juga sosok ahli strategi yang sanggup mencetuskan gagasan cerdas untuk ikut mensukseskan beragam program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Di sisi lain sebagai lembaga kajian dan analisis, Lemhannas juga diharapkan untuk dapat menjadi katalis dalam mendukung penyelesaian berbagai tantangan pembangunan di lingkup nasional serta menyajikan solusi dan langkah terobosan yang paling inovatif guna dikontribusikan dalam mensukseskan program pembangunan yang digulirkan pemerintah di masa kini dan di masa-masa mendatang.

Pada lingkup yang lebih luas, Lemhannas juga diharapkan untuk dapat terus melanjutkan upayanya guna menjadi bagian dari jaringan pengetahuan global --global knowledge network-- yang bersama-sama dengan lembaga sejenis lainnya di negara-negara sahabat, dapat saling bersinergi dalam melakukan

analisis dan sintesis secara terpadu untuk dikontribusikan pada pembangunan tatanan peradaban yang makin maju, dengan ditopang oleh struktur perekonomian yang makin terbuka dan makin berkeadilan.

Penutup

Sebagai bagian dari Keluarga Besar Ikatan Alumni Lemhannas, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin mengajak seluruh alumni Lemhannas agar dapat terus menyuburkan nilai-nilai keteladanan di berbagai ranah pembangunan. Mari kita manfaatkan era keterbukaan publik untuk saling membangun keakraban, harmoni, toleransi, keadaban dan keadilan. Mari kita pelihara empat pilar kehidupan berbangsa dengan terus memperkuat soliditas dan solidaritas antarwarga bangsa sebagai unsur utama yang menjamin suksesnya kinerja pembangunan.

Saya juga mengajak saudara semua agar dapat memberikan dukungan dalam memastikan suksesnya program pembangunan, sesuai kapasitas dan ranah pengabdian masing-masing. Mari kita jadikan Keluarga Besar Alumni Lemhannas sebagai jaringan keunggulan bangsa -- national network of excellence -- yang berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi tantangan pembangunan serta dalam melanjutkan seluruh prestasi pembangunan.

Kepada Saudara Gubernur Lemhannas beserta jajarannya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan saya berikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kajian yang telah dilakukan selama ini. Semoga Lemhannas terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran serta pengelolaan manajemen pendidikan dan kegiatan kajian, hingga tampil menjadi lembaga berkelas dunia dalam bidangnya.

Dirgahayu Lemhannas RI ke-47.



Agung Laksono
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

47 Tahun Kiprah dan Pengabdian

Selaku Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan selaku Anggota Ikatan Alumni Lemhannas RI, saya sangat menyambut baik diterbitkannya Majalah Triwulan "Swantara" dengan Topik "47 Tahun Kiprah dan Pengabdian Lemhannas RI". Gagasan menerbitkan majalah triwulanan ini patut mendapat penghargaan yang tinggi, karena Lemhannas RI sebagai *Center of Excellence* sudah sepatutnya memiliki wahana yang dapat dimanfaatkan sebagai jendela untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran strategik dalam berbagai permasalahan yang berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sungguh mendapatkan suatu kehormatan diminta untuk menyampaikan kesan dan kesan tentang kiprah Lemhannas RI selama ini.

Empat puluh tujuh tahun Lemhannas RI telah berdiri. Empat puluh tujuh tahun pula Lemhannas RI telah mengabdikan dan membuktikan komitmen dalam melaksanakan amanah mulia mengawal NKRI. Tidak diragukan dan tidak ada yang meragukan kiprah dan pengabdian Lemhannas RI selama kurun waktu 47 tahun ini. Perjalanan selama masa yang cukup panjang, menjadikan Lembaga ini semakin hari semakin kredibel. Ini ditandai dengan minat yang bertumbuh bukan saja dari berbagai komponen masyarakat dalam negeri, namun juga peserta pendidikan dari mancanegara. Sungguh, hal ini merupakan pencapaian dan catatan

prestasi yang patut dibanggakan.

Namun pencapaian tersebut, harus dijadikan cambuk dan tantangan tersendiri bagi Lemhannas RI untuk senantiasa berbenah diri dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategik yang berubah sedemikian cepat dan dinamis yang ditandai dengan ketidakpastian dan sulit diprediksi. Daftar panjang persoalan berbangsa dan bernegara yang belum terselesaikan dengan tuntas harus menjadi perhatian tersendiri. Sebagai *Center of Excellence*, Lemhannas RI dituntut mampu memberikan kontribusi positif dalam turut memecahkan persoalan-persoalan strategi bangsa dan negara.

Dengan pembangunan kapasitas dan kapabilitas Institusi secara proposional yang terus dilakukan selama ini, Lemhannas RI akan mampu menampilkan diri sebagai Lembaga Kelas Dunia yang netral, tidak terjebak dalam pusaran politik tertentu serta konsisten pada empat pilar wawasan kebangsaan : Pancasila, UUD 1945, Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Selamat Ulang Tahun yang ke-47. Semoga Lemhannas RI terus berjaya dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang handal, bermoral dan berakhlak mulia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan RidhoNya kepada kita semua.

Amin.



Laksdya TNI Marsetio
Wakil Kepala Staf Angkatan Laut
KRA. XXXVII

Semoga Lebih Banyak Kader Terbaik Dicetak

Secara pribadi saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan merasa sangat terhormat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata tentang kesan, pesan dan harapan pada edisi perdana penerbitan majalah Swantara bertepatan dengan HUT ke-47 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Majalah Swantara adalah media pencerahan yang menjadi jembatan komunikasi dan informasi di antara sesama civitas academica Lemhannas RI, maupun dengan publik. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh staf redaksi pengelola majalah Swantara yang telah bekerja keras menjaga dan membangun kesinambungan informasi strategis dalam mendukung keberhasilan tugas yang diemban Lemhannas RI.

Sebagai salah satu alumni, saya berharap Lemhannas RI dapat lebih banyak lagi mencetak dan mempersiapkan kader-kader bangsa terbaik, apapun profesinya, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan yang dapat membawa Indonesia sebagai negara maju, sejahtera dan bermartabat. Inilah makna terbesar dari kehadiran Lemhannas RI, yang kelahirannya 47 tahun lalu, dibidani oleh para tokoh bangsa yang menginginkan cita-cita proklamasi tetap lestari dan terselamatkan selamanya.

Dalam konteks ruang dan waktu, usia ke-47 bagi Lemhannas tentu menyiratkan rentang perjalanan pengabdian yang syarat makna dari berbagai segi dan sudut pandang, apalagi momentum kelahirannya

senapas dengan hari kebangkitan nasional. Oleh karena itu, dalam usia lebih dari empat dasawarsa tersebut, Lemhannas RI telah mampu mengawal dan mengelola lembaga pendidikan yang strategis ini dalam menyiapkan kader pimpinan tingkat nasional yang memiliki cara berfikir integratif holistik, universal serta menjunjung tinggi nilai-nilai wawasan kebangsaan.

Lemhannas RI sebagai lembaga yang banyak mengedepankan pengkajian konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional, telah memberikan satu pondasi yang kuat kepada para kader bangsa terbaiknya, bahwa untuk mencapai masa depan Indonesia yang lebih baik, bangsa Indonesia harus memiliki modal, antara lain: Pertama, harus memiliki visi dan *grand strategy*, sehingga dapat mengarungi masa depan bangsa dengan arah, tujuan, dan strategi raya yang jelas dan terencana. Kedua, setelah memiliki visi dan *grand strategy*, maka diniscayakan dapat menjalankan manajemen nasional melalui leadership yang efektif pada tingkat strategis. Ketiga, diperlukan persatuan nasional dan kesediaan seluruh komponen bangsa untuk bekerja keras. Keempat, setelah memiliki ketiganya, maka di atas segalanya diperlukan *good governance*. Melalui *good governance*, yang ditandai pemerintah yang responsif, berkemampuan, dan akuntabel, semuanya secara transparan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui keempat modal yang senantiasa ditekankan dalam sistem pendidikan di Lemhannas RI ini, saya yakin masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera akan kita raih.

Alumni Harus Utamakan Kepentingan Bangsa



Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL)

“Saya berharap Lemhannas RI dapat memberi kajian strategis dan aktual untuk bisa menjadi masukan bagi penyelenggara negara dalam pengabdianya kepada bangsa. Selain itu, lembaga juga harus tetap mampu menciptakan kader-kader pimpinan yang profesional dan bisa mengaplikasikan wawasan kebangsaan. Karena

Lemhannas RI memiliki kemampuan untuk membentuk kader yang memiliki seni memimpin untuk mengenali permasalahan bangsa dan mencari solusi tepat,” ujar Ketua Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) yang pernah menjabat Gubernur Lemhannas RI periode 1998-1999 dalam perbincangannya dengan Swantara.

Selain itu, dalam mencetak kader pemimpin nasional, Agum Gumelar juga berharap agar Lemhannas RI tetap melahirkan pemimpin di semua level. “Sebagai Ketua IKAL, sungguh saya sangat berharap agar para peserta didik kelak siap menjadi pemimpin di semua level, berwawasan komprehensif dan memiliki daya saing yang kuat. Selain itu, seorang lulusan Lemhannas ketika melaksanakan tugasnya, dimanapun ia berada, juga harus mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun partainya,” pesannya dengan masih menunjukkan semangat dan harapan yang penuh gelora.



Brigjen Gary Hogan AM., CSC.
Atase Pertahanan Australia Peserta PPRA XLIII

Punya Dua Jiwa

Setelah terjalin sekian lama hubungan pertahanan Indonesia dan Australia, pada 2009, Lemhannas mengundang negara Kangguru tersebut untuk mengirim wakilnya mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Undangan ini tidak disia-siakan oleh Atase Pertahanan Australia di Indonesia waktu itu. Segera negara inipun mengutus Brigjen Gary Hogan, AM, CSC yang fasih bahasa Indonesia untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler (PPRA).

“Saya merasa bangga mewakili Australia,” kata pria yang mengaku lebih mengenal Indonesia lewat pendidikan di Lemhannas. Kesempatan ini pun dimaknainya sebagai langkah yang baik dalam sejarah hubungan kemiliteran antara dua negara bertetangga. “Sekarang saya merasa jiwa saya terdiri dari dua bagian. Separuh Indonesia, separuh lainnya Australia.”

Meski pendidikan di lembaga ini memberi banyak bekal untuk jabatannya sebagai Atase Pertahanan Australia untuk Indonesia, namun bagi penyandang Alumni PPRA XLIII tersebut, Lemhannas RI masih perlu meningkatkan pengetahuan mengenai ketahanan global dengan mengundang pembicara ahli dari negara sahabat. “Jadi ada ilmu timbal balik. Tidak hanya saya saja dari negara luar yang mengetahui Indonesia, tapi siswa Indonesia juga mendapat pengetahuan dari negara-negara lain,” tutur pria yang mengaku mendapatkan pin dengan kerja keras melalui berbagai paper dan seminar selama mengikuti pendidikan selama Sembilan bulan.

Kuncinya di Sumber Daya Manusia



Dr. Rosita S. Noor, M.A.
Peserta PPSA Angkatan ke-VI

“Yang menjadi impian Gubernur Lemhannas RI untuk menjadikan institusi ini sebagai World Class Institution, saya pikir Lemhannas sudah berada di jalur yang benar. Meski masih banyak tantangan, saya yakin dengan kemungkinan bahwa Lemhannas RI akan menjadi lembaga berkelas dunia. Tahun 2025 itu terasa lama. Tapi harus dimulai dari sekarang memikirkan substansi dan strategi untuk mencapai ketahanan nasional yang tangguh. Tentu, semua harus berangkat mulai dengan sumber daya manusia yang dimiliki Lemhannas.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan, melalui rekrutmen yang saya lihat sudah ada peningkatan dari sisi manajemen dan struktural. Ini penting sebagai langkah menuju 2025.

Dalam lima tahun ke depan, Lemhannas harus membuat evaluasi, apakah betul-betul sudah tepat menuju arah itu. Kuncinya adalah SDM, yakni orang-orang yang mampu mengikuti perubahan,” kata Dr. Rosita S. Noor, M.A, yang kini menjadi staf pengajar di Lemhannas RI dengan penuh optimis.



Nurul Arifin
Anggota DPR RI Komisi II

Masih Ada Rasa Maskulin

Peserta pendidikan di Lemhannas RI adalah orang-orang terpilih. Oleh karena itu, lembaga pendidikan ini dapat dijadikan parameter. Orang-orang yang masuk ke Lemhannas mempunyai pola pikir keindonesiaan yang mendalam. Dengan perspektif yang bagus seperti itu, menurut Nurul Arifin, aktris yang sekarang menjadi politisi Golkar, pemerintah seyogyanya menjadikan lulusan Lemhannas sebagai salah satu persyaratan bagi perekrutan jabatan politis, fungsional maupun struktural.

“Saya merasa, apa yang telah diperoleh dari Lemhannas berbekas dan menyatu dalam setiap pemikiran. Ada semacam tanggungjawab moral yang melarang saya untuk tidak membuat malu korps alumni,” ujar Nurul yang kini merasa memiliki pengetahuan wawasan nusantara lebih baik setelah mengikuti pendidikan di Lemhannas. “Cara pandang kami menjadi berbeda. Selalu berpikir integratif, holistik dan sistemik,” lanjut alumnus Lemhannas yang sekarang duduk sebagai anggota komisi II DPR RI.

Ia pun bersyukur, networking yang dulu terjalin semasa pendidikan di Lemhannas sangat membantu kerjanya sebagai politisi. Tapi, sambungnya lagi, “Sebagai seorang wanita, saya merasa Lemhannas RI masih terasa maskulin. Saya menyarankan kuota perempuan untuk staf pengajar agar ditambah.”

Bangga Jadi Alumni



Syafran Sofyan
Alumni PPSA XVI

Sejak diberlakukan Perpres No.67 th 2006, dan diikuti dengan Pergub No.1 th 2006 jo No.1 th 2010, telah banyak perubahan dan peningkatan, baik dalam tugas, fungsi, organisasi dan tata-kerja Lemhannas RI. Saat ini, pesertanya tidak didominasi oleh kalangan TNI dan Polri saja. Tapi juga dari kalangan Civil Society, NGO, pengusaha, pers, parpol, birokrat dan peserta dari mancanegara. Demikian dikatakan Syafran Sofyan salah satu alumnus yang sekarang jadi pengajar professional. "Lemhannas sangat luar biasa. Saya sangat bangga menjadi keluarga alumni," lanjutnya.

Syafran juga berharap, agar semua alumni yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI atau IKAL dapat memajukan dan mengharumkan bangsa di kancah internasional dengan mendukung terwujudnya Lemhannas RI menjadi World Class Institution segera menjadi kenyataan. Selain itu, kualitas hasil kajian dalam bentuk jurnal atau artikelnya juga mengikuti semakin lebih baik lagi.

Baginya, para pejabat yang menjadi tenaga pengajar sering berganti tak menguntungkan bagi lembaga ini. "Perlu waktu untuk beradaptasi bagi yang baru menjadi pengajar," lanjutnya sambil berharap agar sarana dan prasarana yang dimiliki Lemhannas RI dari tahun ke tahun meningkat kualitas maupun kuantitasnya. "Saya mengucapkan selamat kepada Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A dan Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Moeldoko beserta seluruh jajaran Lemhannas. Semoga dengan semangat HUT Lemhannas ke 47, Lemhannas semakin jaya dan keutuhan NKRI tetap terjaga," tutur Syafran mengakhiri percakapan dengan Swantara..



Ario Wijanarko, S.H, M. Sc,
KRA. XXXIX

Semakin Dekat dengan Stakeholders

"Terkait HUT Lemhannas yang ke-47, institusi ini telah beranjak pada usia matang. Artinya Lemhannas harus tetap meningkatkan peran dan kapasitas serta kualitas lembaga terutama untuk menyongsong era globalisasi. Sehingga pada gilirannya nanti Lemhannas akan diperhitungkan dalam percaturan kehidupan baik regional maupun internasional. Saat ini, di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji dan Letjen Moeldoko sebagai gubernur dan wakil gubernur, Lemhannas semakin maju dan mencapai prestasi yang sangat beragam serta semakin dekat dengan para stakeholders.

Oleh karena itu, Lemhannas perlu menyiapkan diri menjadi lembaga yang tidak hanya berkelas nasional saja tetapi juga berkelas dunia (world class institution). Urgensi penyiapan Lemhannas sebagai lembaga berkelas dunia, tidak semata-mata mengikuti trend global, melainkan demi kepentingan nasional Indonesia. Dengan posisi sebagai institusi berkelas dunia pula, Lemhannas akan berperan aktif dan ikut mewarnai dunia dengan pemikiran-pemikiran yang tentunya membawa visi dan misi Indonesia," kata Ario Wijanarko yang dalam diskusi dan seminar di Lemhannas kelompoknya menyoroiti ketidaksinkronan pemimpin daerah dan pusat. Kelompoknya saat itu juga mengusulkan agar Gubernur dipilih oleh Presiden.



**KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
dan Keluarga Besar TNI-AD**

Mengucapkan

Dirgahayu

LEMHANNAS RI

ke-47



Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA

Nahkoda Menuju Lembaga Dunia

Dilahirkan di Yogyakarta, 27 Oktober 1954, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, putera kelima dari pasangan Brigjen (TNI) dr. H. Soepandji dan Ny. Roesmiati Soepandji, mengemban tugas untuk menghantarkan Lemhannas RI meretas jalan menuju Institusi Kelas Dunia.

Tentu saja, untuk mencapainya, tidak semudah membalik telapak tangan, karena banyak “PR” yang harus dikerjakan, mulai dari peningkatan mutu SDM, penyediaan sarana dan prasarana serta melaksanakan program pembenahan organisasi berupa 11 Prinsip Pembaharuan Lemhannas dan tidak kalah pentingnya, mengubah budaya kerja agar sesuai dengan tuntutan zaman.

Namun Budi Susilo yang meraih gelar master dan doktor di Ecole Centrale de Paris, Perancis itu mengakui, sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal harus disingkirkan jika Lemhannas RI ingin menjadi Institusi Kelas Dunia.

Cara berkomunikasi dan penyampaian pendapat di jajaran lembaga yang dipimpinnya harus terus disesuaikan seiring dengan tingginya dinamika perubahan di tengah era keterbukaan, demokratisasi, dan globalisasi saat ini. Budaya militer yang hirarkis, menurut dia, tetap diperlukan, tetapi juga harus dibarengi dengan kecepatan menyerap teknologi, tidak hanya instruksional.

Pola kerja seperti yang dilakukan di masa-masa yang serba tertutup, ujarnya, tidak bisa dipertahankan lagi, sedangkan program untuk merekrut staf organisasi maupun tenaga pengajar di Lemhannas yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing harus terus dilakukan.

Budi Susilo sendiri merasa yakin, Lemhannas mampu berkiper di tingkat dunia, jika institusi ini mampu menyajikan program pendidikan yang memiliki

kekhasan dan memunculkan gagasan-gagasan atau ide asli (orisinil). Keanekaragaman warisan seni-budaya dan juga kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia juga bisa menjadi magnet bagi peserta dari mancanegara untuk mengikuti program pendidikan di Lemhannas.

Sejauh ini, walaupun jumlah jurnal yang dihasilkan oleh Lemhannas secara ‘scientific’ belum sebanding dengan yang diterbitkan oleh institusi sejenis di kawasan Eropa atau Amerika Serikat, namun ide atau gagasan asli yang dituangkan dalam jurnal-jurnal keluarannya bisa dijadikan rujukan oleh institusi atau pihak-pihak yang memerlukannya.

Meningkatnya jumlah peserta dari mancanegara yang mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) di Lemhannas juga menunjukkan bukti bahwa Lemhannas sedang melangkah dengan pasti menuju Institusi Kelas Dunia.

Falsafah hidup Budi Susilo yang meraih Peneliti Utama Riset Unggulan Terpadu VIII (RUT-VIII) dan Peneliti Utama Riset Unggulan Kemitraan V (RUK-V) mengedepankan kesederhanaan dan sikap bersahaja. “Kesederhanaan adalah salah satu kunci keberhasilan yang hakiki, sebaliknya, hidup secara berlebihan, apalagi harus ‘mengada-adakan’ mencerminkan kepalsuan karena hanya akan menutup-nutupi realitas,” kata Budi.

Mengenai karakter kepemimpinan, Budi Susilo yang pernah menjabat Dirjen Potensi Pertahanan itu berpendapat, seorang pemimpin harus rela berkorban, menerima dan mensyukuri kenyataan, jujur dalam

berpikir, bersikap dan berpendapat, merampungkan pekerjaan dengan tuntas dan penuh kesabaran, menerima dan menghargai pendapat orang lain dan memaafkan orang lain.

Solidaritas pertemanan dan kebersahajaan sikap Budi Susilo juga diakui oleh orang yang pernah mengenalnya dari dekat seperti yang diungkapkan berikut ini.

"Sebagai mitra kerja beliau cepat memahami sesuatu dan terbuka menerima masukan. Bekerja dengan beliau sangat nyaman, karena kita diberikan kebebasan, sepanjang masih tetap dalam koridor," tutur mantan Direktur Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Leonardi.

Mengungkapkan pengalamannya, Leonardi mencontohkan, saat ia diminta membuat tulisan



Leonardi

atau tanggapan, Budi Susilo selalu berusaha memahami tulisannya, tidak langsung mencorat-coret ide yang dituangkan dalam tulisan, melainkan berusaha menangkap ide tersebut dan kemudian meluruskannya. Atasannya itu, menurut Leonardi, selalu menghargai pendapat orang lain dan dengan caranya, dia diberi

arahan, kemudian yang kurang disempurnakan. "Selebihnya kita gali sendiri," ungkap Leonardi. Leonardi menilai, tidak ada perubahan dalam diri Budi Susilo dari dulu sampai sekarang, walaupun ia selalu berusaha berbuat terbaik untuk perubahan. "Semuanya selalu disikapi dari sisi positif dan menikmati kerja serta memiliki greget untuk menjadikan Lemhannas sebagai Institusi Kelas Dunia," kenang Leonardi.

Budi Susilo yang menghabiskan masa kecilnya di kota Magelang, Jawa Tengah dalam pertumbuhannya banyak dipengaruhi oleh didikan kerabatnya, Kapten (TNI) Soenarto Mertowardoyo yang mengajarnya sikap kasih sayang pada sesama dan kepercayaan pada Tuhan.

Kejujuran juga selalu dipegang Budi Susilo dalam menjalankan semua amanah yang diterimanya seperti yang dituturkan Hera Widayanti, istri Budi Susilo yang telah mendampingi selama 29 tahun. Tak lama setelah Budi Susilo ditempatkan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) (2004-2005), ibu dari Wanda Soepandji dan Kris Wijoyo Soepandji itu mewakili suaminya datang ke satu pertemuan, lalu disana ia

bertemu dengan rekan-rekan Budi Susilo. Kata mereka, sayang sekali bapak 'dibuang' ke Kopertis, namun saya meyakinkan bahwa suami saya tidak pernah merasa kecewa. "Pekerjaan yang diterimanya selalu diterima dengan senang hati dan dijalankan dengan tekun," kenang Hera.

Menurut Hera, keberhasilan yang diperoleh hingga kini adalah buah perilaku Budi Susilo. Sejak kecil, Budi Susilo selalu diajarkan untuk arif dalam menyikapi hidup, pandangan itu terbawa pada sikapnya hingga saat ini. "Oleh keluarganya, Bapak selalu diajarkan untuk menjalani hidup dengan jujur, taat, tabah, dan berbudi luhur. Ia selalu fokus pada setiap pekerjaannya, meskipun pekerjaan itu sederhana. Sepanjang itu membawa kebaikan dan untuk kepentingan negara, walau ditempatkan dimanapun, Bapak selalu melakukan yang terbaik." Hera menuturkan.

Kepada putra-putrinya, Budi Susilo menempatkan dirinya sebagai teman. "Teman diskusi yang menyenangkan bagi anak-anak. Sering sekali anak bungsu kami, Kris memberikan oleh-oleh buku tebal untuk ayahnya," kata Hera. Dukungan keluarga yang besar untuk Budi Susilo, merupakan energi tersendiri untuk tetap memberikan kerja yang terbaik untuk kepentingan yang lebih luas.

Kearifan dalam membesarkan buah hatinya, didapatkan Budi Susilo dari Ny. Roesmiati, sosok ibu yang sukses mengantarkan keenam anaknya menjadi "orang", bahkan bukan "orang sembarangan". Anak pertamanya, Hendarto adalah seorang dokter dan sekaligus pensiunan dosen di FK Universitas Diponegoro, putera kedua Hendarman, mantan Jaksa Agung, putera ketiga, Hendarati, satu-satunya perempuan yang berprofesi sebagai psikolog, kemudian yang keempat, mantan Puspom TNI-AD Mayjen (Purn) Hendarji, kelima, Budi Susilo yang saat ini menjadi Orang Nomor 1 di Lemhannas RI, kemudian keenam, si bungsu, Ir. Bambang Trisasongko M.Sc., insinyur teknik yang menjadi pengusaha.

Bagi rekan sealmamaternya di FTUI, Hamdion Nizar, Budi Susilo yang mendapatkan anugerah dari UI sebagai Guru Besar Tetap Bidang Mekanika Tanah itu juga dikenalnya sebagai sosok yang bersahaja.

"Mas Budi yang dulu saya kenal sebagai kakak senior sewaktu kuliah dan Mas Budi saat ini sebagai gubernur Lemhannas, tetap sama. Sikap sederhana dan sifat ingin menolong sesama rekan tetap menonjol pada dirinya," kata Hamdion Nizar. Meskipun menyandang posisi penting di pemerintahan, sambung Hamdion, gaya egaliternya, membuat teman, alumni junior maupun mahasiswa merasa nyaman bergaul dengannya.

Pemikiran Budi Susilo yang luas mengenai kebangsaan, menurut Hamdion, juga sering memotivasi

dan menginspirasi adik-adik mahasiswa, ditambah lagi dengan kecintaannya pada musik, menjadikan ia sebagai sosok yang unik, serius tapi santai.

Setelah berpisah selama 15 tahun Hamdion kembali bertemu Budi Susilo pada 2003 saat peresmian Yayasan Mata Air Biru (MAB) oleh alumni FTUI – yayasan sosial yang bergerak dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan anak karyawan FTUI. Kemudian pada 2009, di tengah kesibukannya, Budi Susilo masih bersedia meluangkan waktu dan memberikan dukungan bagi almamaternya, FTUI dengan menggagas penyelenggaraan turnamen golf tahunan Iluni FTUI guna menghimpun dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi melalui MAB.



Hera Widayanti Soepandji

Mengemukakan, potensi ancaman terbesar bangsa Indonesia selain kemiskinan adalah praktek korupsi yang merupakan salah satu wujud dari sikap ketidakjujuran. Menurut dia, sudah banyak contoh hancurnya suatu negara akibat praktek korupsi, dan peringatan bahwa negara bisa hancur karena praktek korupsi yang tidak tertangani bukanlah mengada-ada. "Kejujuran adalah segala-galanya. Jujur pada diri, orang lain, apalagi kepada Tuhan," tandasnya.

Kesabaran Budi Susilo di lingkungan pekerjaannya juga mengesankan ajudannya itu. "Pak Budi tidak pernah marah, apalagi membentak-bentak bawahan seperti sikap yang kadang-kadang ditunjukkan oleh seorang atasan yang memiliki kekuasaan.

Dengan segudang prestasinya sebagai peneliti, pengajar dan birokrat, suami dari Ny. Hera Widayanti Soepandji dengan putera mereka, Wanda Soepandji dan Kris Soepandji tersebut masih aktif membina Orkes Simfoni Mahawaditra, UI. Sejak kanak-kanak, Budi Susilo selain aktif dalam Gerakan Pramuka juga gemar memainkan

piano, saksofon dan alat musik tiup lainnya.

Sikap sederhana, bersahaja dan menjauhi kemewahan yang merupakan ciri keluarga Budi Susilo dituturkan pula oleh ajudannya, M. Nur. "Keluarga Pak Budi biasa-biasa saja, namun yang menonjol adalah suasana harmonis dan hangat, juga sangat demokratis, bahkan puteranya, Kris memanggil beliau dengan 'Prof,'" tutur M. Nur.

Mengenai kejujuran, Budi Susilo juga pernah



Hamdion Nizar

masa-masa mahasiswa dulu, walaupun saat ini sulit untuk dilakukannya lagi, karena selain menyangkut protokoler ia juga harus memilih-milih makanan karena alasan kesehatan.

Di tengah kesibukannya sebagai Orang Nomor 1 di Lemhannas, Budi Susilo juga masih bergiat di berbagai organisasi ilmiah seperti Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI), Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI), Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Conceille Internationale Batiment (CIB), Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia.

Olahraga jogging dan berenang masih dilakukan walaupun tidak secara rutin oleh Budi Susilo yang mengaku menggemari sup kacang merah – menu warisan kuliner Belanda - yang saat ia masih kanak-kanak sering disajikan oleh ibundanya.

Budi Susilo juga mengaku kadang-kadang "kangen" makan di warung Tegal seperti

BIODATA BUDI SUSILO SOEPANDJI

NAMA : Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA
TTL : Yogyakarta, 27 Oktober 1954
Alamat : Jln. Kemanggisan Hilir. Blok M 2 A, Komplek Sekretariat Negara Slipi, Jakarta Barat
Jabatan : Gubernur Lemhanas RI

Pendidikan :
S1 Teknik Sipil UI Lulus, 1979, S2 Geotechnical Engineering Ecole Nationale des Travaux Publics de L Etat di Paris, Perancis, 1983, S3 Geotechnical Engineering Ecole Centralaen di Paris, Perancis, 1986 (Predikat Tres Honorable)

Penghargaan :
Dosen Teladan I Tingkat Nasional, 1994, Bintang Yudha Darma Nararya, 2010, Peneliti Hibah Bersaing, RUT, RUK 1993 – 2002, Guru Besar UI 1998 bidang Sipil – Geoteknik, Peneliti Terbaik UI bidang teknologi, 1988
Pendidikan Kursus :
Kursus Reguler Angkatan 37 Lemhannas RI dengan Predikat Andalan, 2004, IHEDN Paris Perancis, 2006, Executive Course di Marshall Center Munich Jerman, 2009, APCSS-Stanford Univ, Amerika Serikat, 2010

Karier :
Pembina Orkes Simfoni UI Mahawaditra, 1994– sekarang, Dirjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 2005–201, Koordinator Perguruan Tinggi III Jabotabek, 2004–2006, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2000–2004



Melayani Dengan Setulus Hati



Sejarah BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.



Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.



Membela Negara

Oleh : Prof. Irwan Abdullah

Ketika demokrasi menyederhanakan proses bernegara dan berbangsa, pusat kekuasaan jagat bergeser dari negara ke rakyat. Untuk waktu yang panjang, sejak formasi negara berlangsung di Indonesia segera setelah kemerdekaan 1945, negara telah menjadi hampir satu-satunya kekuatan yang mendefinisikan ruang dan jiwa hidup bangsa. Kekuatan lain merupakan kendali yang hampir tidak berarti karena dominasi negara yang tidak jarang menggunakan koersi dalam melestarikan kekuasaan atas rakyat. Hegemoni negara merupakan jargon yang jamak dipakai untuk menunjukkan ketimpangan hubungan antara Negara dan rakyat yang dipelihara melalui state apparatus.

Saat ini, setelah demokrasi menjadi matahari dalam hidup bernegara dan berbangsa, rakyat mengambil alih kekuatan sejarah sejalan dengan runtuhnya dominasi Orde Baru pada 1998. Setelahnya, Orde Reformasi pun merangkak dengan pasti walaupun dengan format yang terus dicari. Gerakan reformasi itu dengan bahan bakar demokrasi tidak jarang mengalami kerancuan konseptual dan ketidakmenentuan arah sejalan dengan cita-cita untuk memberikan "power" kepada rakyat yang terus dilesakkan. Berbagai ujian terus berlangsung di dalam atau di luar gedung DPR, di jalan-jalan dengan berbagai tuntutan yang bersembunyi di balik kepentingan rakyat, dalam wacana yang menjadikan rakyat sebagai suatu alasan dalam berbagai tindakan yang meminta pengakuan.

Negara tiba-tiba menjadi "yang tertuduh" ketika rakyat atau lembaga yang mengatasnamakan rakyat mulai bicara. Media elektronik dan cetak menghujat negara dengan mendudukkan negara di kursi panas yang serba salah. Berbagai agensi mengobryekan negara dan meminta tanggung jawab negara atas berbagai kebijakan yang dinilai keliru. Nilai kebenaran mulai didefinisikan di jalan dengan etika-etika non konvensional, dengan parameter yang relatif, mulai didefinisikan oleh banyak pusat yang menjadikan kebenaran itu debatable. Sebelumnya, kebenaran itu sesuatu yang diberikan dan diterima, hampir tidak bisa dipertanyakan.

Benar adanya bahwa negara bukan satu-satunya pemegang kekuasaan ketika berbagai non-state actor mulai mengambil peran penting. Tiga hal sedang terjadi dalam transisi kehidupan bernegara dan berbangsa. Pertama, pergeseran kekuasaan hampir berarti pengambilalihan, bahkan pelucutan kekuatan negara, oleh berbagai kekuatan yang ingin memperjuangkan kebebasan rakyat. Negara dengan karakter dan kapasitas pemerintah yang ada sekarang dianggap tidak kredibel untuk meneruskan cita-cita dan mewujudkan tujuan nasional.

Kedua, gerakan perubahan besar yang sedang terjadi belum sampai pada suatu format hubungan kelembagaan yang sinergis antara negara dan aktor non-negara. Hubungan kemitraan yang bersifat kolektif dalam mendefinisikan dan menyelesaikan tugas bersama belum terbentuk. Yang terjadi masih pada tataran saling menyalah dan saling mencari dukungan dan pengaruh.

Ketiga, tampak adanya kesamaan dalam metode yang digunakan baik oleh kelembagaan negara maupun non-negara. Keduanya memiliki klaim yang sama "membela rakyat" untuk alasan yang berbeda. Hasilnya belum banyak berbeda, gizi buruk, pendidikan yang masih rendah, kemiskinan yang akut, konflik dan kekerasan masih merajalela, dan ancaman-ancaman bencana yang terus dihadapi. Apakah ada harapan baru dari pergeseran pusat kuasa ini? Belum banyak bisa disimpulkan.

Ketika negara dengan segala salah dan khilaf didudukkan sebagai tersangka dalam wacana publik, siapa yang membelanya? Bagaimanapun suatu kemajuan membutuhkan apa yang diimpikan sebagai *strong state* sebagai landasan. Paling tidak, untuk bangsa dengan tingkat intelektualitas seperti Indonesia, dengan ragam budaya yang begitu banyak, dengan tantangan global yang begitu berat, bangsa ini membutuhkan negara. Untuk itulah kita sebut Nnegara-bangsa.

- Irwan Abdullah, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Narasumber Lemhannas RI.



Program pembangunan sarana dan prasarana Lemhannas RI

Kegiatan Pembangunan Mess Lemhannas

Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, Lemhannas RI terus melakukan evaluasi dan perbaikan, baik untuk materi pelajaran, tenaga pendidik, metode pendidikan sampai pembangunan gedung mess. Untuk peningkatan pelayanan bagi peserta, lembaga ini membangun Gedung Dwi Warna berlantai lima untuk 140 kamar mess dan auditorium. Pembangunan sudah dimulai sejak 2010, dengan pekerjaan pondasi dan struktur sampai pada lantai lima.

Pembangunan dilanjutkan pada 2011, dengan pekerjaan penyelesaian struktur sampai dengan lantai tujuh, penyelesaian auditorium dan 35 kamar mess serta facade. Biaya yang sudah terserap untuk pembangunan tersebut sekitar Rp. 62 milyar dari total biaya sebesar Rp. 77 milyar. Pada 2012 dan 2013 dilanjutkan menyelesaikan 105 kamar mess, pemasangan lift dan facade sisi selatan dan utara. Sementara untuk memenuhi kebutuhan ruang pejabat dan staf, di tahun 2011 telah dimulai pembangunan tahap satu sayap kiri gedung Asta Gatra dengan biaya mencapai Rp. 7,6 milyar. Kelak tempat ini akan ditempati Karo Humas dan Staf.

Remunerasi, Bukan Akhir Proses Reformasi Birokrasi

Lemhannas RI pada tahun 2011 telah mengajukan remunerasi atau tunjangan kinerja yang merupakan

konsekuensi logis dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Kabar dari Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara, akhir Januari lalu menyatakan, sebanyak 20 Kementerian/instansi akan segera mendapatkan remunerasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi, salah satunya adalah Lemhannas RI.

Hingga kini proses remunerasi yang diajukan tinggal selangkah lagi. Tinggal menanti persetujuan Presiden RI yang merupakan tahap akhir realisasi remunerasi yang telah diajukan Lemhannas RI sebelumnya.

Namun demikian, remunerasi bukan akhir dari proses reformasi birokrasi. Tetapi merupakan titik awal bagi segenap jajaran Lemhannas RI untuk bekerja lebih profesional, membangun citra pelayanan publik dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa. Seiring dengan meningkatnya kinerja dan profesionalitas, tentu remunerasi diharapkan akan turun dalam tahun ini. Semoga

PPSA XVIII Dimulai

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan Keutuhan NKRI menjadi tema yang diusung pada Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII.

PPSA XVIII Lemhannas RI yang berlangsung selama 5,5 bulan tersebut, dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA di Lemhannas RI, Jakarta, 17 April lalu. Program PPSA kali ini diikuti 60 peserta dari berbagai latar belakang profesi, latar belakang disiplin ilmu dan profesi.

Dengan keragaman dan dinamika yang berlangsung dalam proses pendidikan, diharapkan program pendidikan ini mampu menghasilkan dan membentuk watak dan karakter kepemimpinan nasional yang visioner dan memiliki wawasan kebangsaan tangguh serta mampu merefleksikan pemikirannya ke depan bagi sinergitas pembangunan, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah.

Training of Trainers (ToT)

Lemhannas RI untuk pertama kali menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) di Lemhannas RI, Jakarta pada 6 Februari lalu.

ToT sendiri merupakan pembekalan tentang metode sosialisasi dan esensi nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa yang dikemas dalam bentuk ceramah dan diskusi, pendalaman materi dan simulasi mengajar.

Saat ini Lemhannas terus melakukan evaluasi terhadap materi, mekanisme dan metodologi sosialisasi, agar diperoleh materi, mekanisme dan metodologi yang adaptif dan implementatif dengan kondisi di setiap sasaran. Diharapkan peserta yang dilatih mendapatkan bekal, kemampuan, tekad, semangat dan komitmen yang kuat menjadi ujung tombak kegiatan sosialisasi empat pilar wawasan kebangsaan secara efektif, tepat azas, tepat waktu, dan tepat zaman guna penguatan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia.



Dr. Drs. Agustinus Fatem, MT
Peserta PPRA XVI

Memperluas Cakrawala

Program yang diselenggarakan Lemhannas sangat bermanfaat karena memiliki berbagai nilai tambah dan memperluas cakrawala pemikiran sebagai bangsa Indonesia. Di Papua, Lemhannas dikenal masyarakat memiliki nama “besar”. Mereka berpendapat, lulusan Lemhannas dianggap memiliki pikiran yang jauh lebih luas dan memiliki wawasan kebangsaan sehingga biasanya akan diproyeksikan ke depan menjadi seorang pemimpin.

“Sebelum masuk Lemhannas, saya belum memahami apa yang dimaksud dengan penyiapan pemimpin masa depan. Apalagi tiap peserta datang dari latar belakang dan paradigma yang berbeda,” kata Dr. Drs. Agustinus Fatem, MT, dalam wawancara yang santai di tengah kesibukannya mengikuti pendidikan di Lemhannas.

Perbedaan ini, menurutnya, juga dapat dilihat dari sisi keilmuan, profesi dan tugas yang diemban masing-masing peserta. “Kalau saya berpikir sejak awal tentang apa yang bisa saya berikan bagi pembangunan bangsa dari sisi keilmuan. Begitu saya masuk ke Lemhannas, ternyata apa yang saya ketahui hanyalah sebagian kecil dari bagian pemikiran besar tentang cara membangun negara. Inilah yang membuat saya semakin termotivasi belajar di Lemhannas,” lanjut akademisi dari Papua ini serius.

Baginya, ilmu yang didapat akan coba dikembangkan di kampus tempatnya mengajar. “Termasuk pemahaman dan pengamalan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara karena hal-hal semacam ini belum tersosialisasi dengan baik serta belum banyak orang memahaminya” ujarnya lagi.



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A
Wakil Sekretaris Jendral MUI, Peserta PPSA XVIII

Tak Ragu Memberi Ide

Banyak yang memiliki anggapan, sebagai bangsa yang besar Indonesia memiliki permasalahan yang besar pula. Sehingga kehadiran lembaga seperti Lemhannas diperlukan untuk memberikan kontribusi dalam mencari solusi bagi setiap permasalahan bangsa. Masalah besar yang kerap muncul menyangkut etnik, agama, sosial, kemiskinan, pendidikan serta permasalahan lainnya yang membutuhkan penyelesaian yang benar, cepat dan tepat. Jika muncul konflik di sana-sini, tentu perlu upaya penyelesaian yang arif dan komprehensif. Untuk meredamnya, dibutuhkan wadah berupa lembaga pengkajian dan penyiapan kader yang benar dan tepat.

“Sebelumnya saya tidak tahu banyak soal Lemhannas,” kata Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A, jujur. Menurutnya, Lemhannas RI seperti lembaga akademik lainnya. Ternyata dalam kelompok pelatihan yang ia ikuti selama ini, yang setengahnya berasal dari ketiga angkatan TNI dan Polri, mampu memberikan wawasan baginya tentang kerjasama tim untuk memecahkan permasalahan bangsa.

Tentu, setelah mengikuti pelatihan, ia berharap bisa membagi ilmu dengan rekan sekerja, keluarga atau masyarakat sekitar. Hal ini dimungkinkan, karena memiliki berbagai saluran untuk menyampaikan gagasan kepada masyarakat, baik melalui kampus, organisasi atau pun saluran lainnya. “Saya berharap, setelah mendapatkan wawasan dan ilmu selama mengikuti pelatihan di Lemhannas, saya tidak akan ragu lagi menyampaikan ide, usulan dan masukan bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya lebih lanjut.



Prof. Marthinus Johannes Saptteno
Guru Besar Unpatti Ambon, Peserta PPRA XLVIII

Tak Sekedar Pernah Ikut

Pengalaman membuktikan, pasca tumbanganya Orde Baru dan lahirnya reformasi, ternyata nilai-nilai berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat semakin luntur. Dampak negatifnya, terjadi perubahan perilaku secara mencolok dari satu generasi ke generasi penerusnya. Oleh karena itu, Lemhannas sangat penting kedudukannya untuk memberikan kontribusi pemikiran holistik terhadap penyelesaian permasalahan bangsa. Tak hanya dalam tataran pengetahuan, tetapi juga pada tataran praktiknya. Hal tersebut disampaikan Prof. Marthinus Johannes Saptteno.

Bagaimana ceritanya menjadi siswa Lemhannas RI, ia menyampaikan lebih lanjut, "Pertama kali informasi tentang pelatihan datang dari pemerintah daerah. Selanjutnya diteruskan kepada rektor yang kemudian merekomendasikannya pada saya. Pertimbangannya, latar belakang pendidikan saya ilmu hukum, sehingga perlu pendalaman lebih jauh tentang nilai-nilai kebangsaan terutama tentang Pancasila," tuturnya di rehat siang.

Menurutnya, Lemhannas merupakan suatu institusi yang sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 kepada seluruh warga negara. Selain itu, harapannya sesuai mengikuti pendidikan di Lemhannas ada perubahan perilaku yang signifikan dari peserta. Artinya apa yang ditanamkan harus diimplementasikan dalam seluruh aktivitas di institusi masing-masing. Tidak hanya sekedar pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di Lemhannas.



Drs. H. Mursyid Sonsang
Ketua PWI Provinsi Jambi, Peserta PPSA XVIII

Menulis dengan Rasa Nasionalis

Para peserta pendidikan atau pelatihan menyadari, kedudukan wartawan dan media massa, baik cetak maupun elektronik tidak kalah pentingnya dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Kebebasan dan kecepatan dalam menciptakan serta mengakses informasi, menjadi salah satu usaha dalam menanamkan nilai-nilai keteladanan dan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

"Motivasi saya mengikuti pelatihan ini adalah untuk menambah wawasan kebangsaan. Kami melihat pertumbuhan media saat ini sangat pesat, sehingga wartawan dituntut untuk memiliki wawasan kebangsaan yang kuat terutama menghadapi ancaman media dari luar. Kita berharap dengan mengikuti pendidikan di Lemhannas wawasan kebangsaan dan kecintaan terhadap negara semakin menebal", kata jurnalis asal Jambi ini bersemangat kepada Swantara.

Tak hanya itu, hal lain yang membuatnya mengikuti pelatihan ini juga untuk menambah jaringan dan sinergi antara wartawan dengan kelompok-kelompok lainnya. Untuk mencapai tujuan bersama seperti kemakmuran maka menurutnya sangat perlu untuk saling bersinergi. Baginya wartawan perlu memiliki identitas kebangsaan dan masih perlu ditingkatkan. Sebagai seorang wartawan dan anggota masyarakat Indonesia, bersinergi demi kemajuan bangsa dan keutuhan NKRI sudah merupakan harga mati. Harapan lainnya? "Saya menginginkan agar bangsa Indonesia mampu menemukan calon pemimpin bangsa yang mampu memberikan suri teladan."



Brigjen Dato Hj Azlan bin Abd. Rahman
Angkatan Tentara Malaysia, Peserta PPRA XLVII

Pahami Pola Pikir Indonesia

Sembilan bulan menempuh pendidikan di Lemhannas RI dan jauh dari kampung halaman bukanlah hal yang mudah. Bagi perwira tinggi Malaysia ini, hal tersebut tidak menjadikan masalah. "Saya tidak ingin ketinggalan ilmu dari Lemhannas RI, terutama dari program *E-Learning* sebagai media pembelajaran. Saya terus ingin menambah ilmu. Dan selama *off campus* yang menarik adalah pembelajaran melalui *E-Learning* ini," ujar pria kelahiran 1961 yang merasa mendapat banyak manfaat belajar melalui *e-chatting* selama *off campus* itu.

Sejak hadir di kursus ini pada 24 Januari 2012 sampai sekarang, ia pun menganggap telah memperoleh berbagai pengetahuan dari modul pembelajaran yang disampaikan oleh Lemhannas melalui enam modul. Ia tidak mengalami kesulitan mendalami modul-modul tersebut.

Baginya, pendidikan di Lemhannas RI mampu memberikan wawasan dan pemahaman cara berpikir bangsa Indonesia dalam membangun semangat kebangsaan, terutama untuk mencapai tujuan bangsa. Selain itu, pendidikan di Lemhannas RI memberi dukungan akan terciptanya hubungan yang baik antara Indonesia dengan Malaysia. "Saya telah merasakan, baik secara pribadi maupun kenegaraan, telah tercipta hubungan yang baik dalam *networking* maupun jaringan persahabatan," lanjutnya.

Keikutsertaannya dalam PPRA ke-47, juga cukup menarik karena bertepatan dengan HUT ke-47 Lemhannas RI. "Seiring dengan itu saya mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun ke-47 Lemhannas RI," ucapnya menutup wawancara dengan Swantara.



Brigadir Jenderal Bassam Barakat Farhan Frehat
Command Brigadir Yordania, Peserta PPRA XLVII

Perkokoh Hubungan Persahabatan

"Saya sangat senang sekali memperoleh kesempatan belajar di sini, karena Lemhannas adalah tempat yang cocok untuk belajar. Mudah-mudahan saya bisa belajar tentang strategi ketahanan, walaupun enam bulan tentu tidak cukup untuk mampu menguasai percakapan dalam bahasa Indonesia dengan lancar," kata Brigadir Jenderal Bassam Barakat Farhan Frehat dalam wawancaranya dengan reporter Swantara.

Memang, pendidikan PPRA di Lemhannas sejauh ini telah diikuti 42 peserta dari 22 negara sahabat dengan harapan agar para alumninya dapat menjadi perekat antara RI dengan negara-negara sahabat sebagai upaya mewujudkan perdamaian dunia. Jordania adalah salah satu negara yang secara rutin mengirimkan perwakilannya dalam program pendidikan di Lemhannas.

"Harapan saya, ilmu yang saya peroleh selama menjadi peserta PPRA bisa diaplikasikan di negara saya dan juga semakin memperkokoh hubungan persahabatan antara kedua negara," lanjut Bassam yang berpangkat Command Brigadir di negaranya, yang se usai pendidikan PPRA diangkat menjadi Direktur Pertahanan Udara.



Citta Virya, SH
Ketua Kerohanian Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia
PPRA XLVII

Bukan Ijasah yang Dicari

“Bukan ijasah yang saya perlukan, tapi apa manfaat kami bagi pemerintah. Saya ingin sekali memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga masyarakat pun bisa merasakan kontribusi kami,” kata Citta Virya, SH, yang kini pandangannya tentang pemerintahan dan Pancasila berubah 180 derajat setelah menjadi peserta pendidikan di Lemhannas RI.

Menurutnya, masih banyak pemahaman yang keliru mengenai Pancasila dan pemerintah di mata kaum minoritas. Tapi kini, justru ia merasa dilindungi, dijaga, dan dibantu. Karena pengalaman ini pula, pandangannya benar-benar telah berubah total. “Pendidikan di Lemhannas sangat tepat untuk golongan masyarakat minoritas. Karena banyak sekali masyarakat yang tidak mengenal sistem pemerintahan dan tujuan pemerintahan itu sendiri,” tuturnya sehabis makan siang bersama di Lemhannas RI.

Perhatian dari pemerintah dengan mengikutsertakan perwakilan golongan minoritas, menurutnya bermanfaat bagi pemerintah dalam menyebarkan wawasan kebangsaan dan memberikan pemahaman yang benar mengenai Pancasila. “Ini tindakan yang adil,” tegasnya kemudian. Namun ia masih melihat, banyak lulusan PPRA yang berasal dari kelompok minoritas tidak banyak terlibat dalam pemerintahan serta tidak bisa ikut dalam mengambil keputusan. Baik bagi komunitas, maupun bagi masyarakat secara luas.



Komaruddin
Danrem 101/ Dam VI/MLW, PPRA XLVII

Tempat Mewujudkan Nasionalisme

“Saya bangga telah diberikan kesempatan menjadi peserta PPRA XLVII karena pesertanya merupakan orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat dari semua unsur TNI, POLRI, Sipil, Ormas dan Mancanegara. Ini merupakan kesempatan untuk berkontribusi dan saling mengenal untuk menjadi bekal jika dikemudian hari diberi kesempatan untuk memimpin bangsa ini.

Namun, masih ada yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan jarak jauhnya. Karena banyaknya peserta yang masuk ke *e-learning* tidak diantisipasi sehingga sering terjadi hambatan.

Saya juga berharap pada para peserta PPSA dan PPRA, yakni para gubernur, bupati dan walikota agar terus memupuk rasa nasionalisme sesuai mengikuti pendidikan di Lemhannas. Hal ini mengingat sebagai bangsa yang majemuk, diperlukan pemimpin yang nasionalis. Disinilah tempatnya. Jadi jangan dikurangi jatah untuk para gubernur, bupati dan walikota untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas

Jayalah Lemhannas semoga harapan-harapan bangsa ini bisa terwadahi di Lemhannas karena setiap kajian yang dihasilkannya akan disampaikan sebagai masukan kepada Presiden” tutur Komandan Korem 101/ Kodam VI Mulawarman, Kolonel Inf. Komaruddin dengan mantap kepada Swantara.



Karjo, Supir Antar Jemput Pegawai

Bersyukur Sepanjang Hidup

Karjo, melayani dengan ikhlas dan bertanggungjawab. Bekerja ikhlas itu berasal dari hati nurani. Dan yang paling penting lagi, dalam bekerja jangan pernah berbohong.

Senja itu, langit masih tampak cerah. Karjo dengan semangatnya yang masih menyala, sedang duduk sejenak menikmati secangkir teh sambil menunggu jam kerja berikutnya. Bagi pegawai Lemhannas, Karjo bukanlah sosok yang asing lagi. Selain tampil sederhana, Karjo adalah pegawai yang tekun dan lebih mengedepankan persahabatan serta kualitas pelayanan dalam bekerja. Jadi jangan heran, jika Karjo tidak kalah pamornya daripada pegawai atau bahkan pejabat-pejabat di Lemhannas.

Dengan tenang dan santai, kembali diteguknya secangkir teh yang sudah dipesannya terlebih dahulu. Karjo pun mulai bertutur tentang pengalaman selama bekerja di Lemhannas. "Aktivitas saya sehari-hari biasa-biasa saja. Setiap pagi-sore antar-jemput karyawan, dan biasanya penumpang penuh terus. Saya bekerja di Lemhannas mulai tahun 1987. Rutinitas saya setiap harinya adalah mandi pukul 4.00 subuh, kemudian berangkat pukul 4.30 untuk menjemput dan mengantar para pegawai Lemhannas. Dan ini sudah kewajiban saya, jadi mau apalagi, meski jarang sholat subuh. Biasanya kalau sholatnya di batin, sambil jalan," tutur Karjo sambil mengulum senyum dengan semringah.

Setiap hari kerja ada kurang lebih 11 jemputan. "Kalau jumlah penumpang saya jarang hitung, karena selain penumpang tetap, terkadang banyak orang kantor yang numpang. Siapapun orangnya, asal sekantor saya

angkut, tidak pilih kasih, lagian ngapain harus pilih kasih. Daripada cari musuh lebih enak cari teman. Masa sesama orang kantor tidak saling kenal, kalau ditanya orang luar, kita tidak kenal, malu kan," ungkap Karjo, lelaki kelahiran 1964 tersebut.

"Sejak 1987 sudah menjadi supir, dan sudah pernah membawa berbagai macam pejabat. Saya tidak pernah merasa bosan kerja. Kalau bosan tidak kerja di sini. Dalam bertugas, saya juga pernah membawa jenazah ke Palembang tiga kali dengan mobil Kijang, dan jenazah dari Bandung. Jadi saya sering jalan-jalan ke luar kota, selain ke Palembang juga ke Yogya, Surabaya membawa penumpang, termasuk juga atasan," tutur Karjo.

Suka Duka

Senja kian meninggi, langit pun semakin matang. Udara lalu lalang silih berganti memberikan kesejukan, dengan tenang dan bangga Karjo mulai bertutur mengenai kunci dalam bekerja. "Dalam bekerja kuncinya hanya satu, yakni melakukannya dengan ikhlas. Bekerja ikhlas itu berasal dari hati nurani dan yang paling penting lagi, dalam pekerjaan jangan pernah berbohong. Kalau suka berbohong, kita akan "dilempar" ke mana-mana. Kelihatannya sepele, tapi godaannya besar. Dulu pernah di mobil ada emas dan berbagai macam barang berharga lainnya yang tertinggal. Tidak pernah terbesit keinginan saya untuk mengambilnya, justru saya malah ketakutan



sehingga saya terus menjaga dan mengawasi, takut-takut ada yang mengambil. Kecuali kalau memang dikasih, itu baru saya ambil. Kalau tidak dikasih, ya saya tidak akan pernah berani untuk meminta. Biasanya orang yang saya bawa itu selalu awet, sampai pensiun. Bahkan dulu ketika bos saya yang berpangkat kolonel sudah pensiun, dia tetap menjemput saya ke rumah, agar saya ikut dengan dia (bekerja dengan mantan bos),” tutur Karjo.

Menurut pengakuan Karjo, dirinya bisa bekerja di Lemhannas, karena ada saudara yang membawanya. Meski waktu itu masih bekerja jadi supir penghantar bahan bangunan (material). Kemudian di Lemhannas dia diuji untuk mengemudi. Dua tahun kemudian, ia diangkat menjadi pegawai. Sementara teman-teman yang dulu sudah pada ke luar, pindah kerjaan. Selayaknya para pekerja lainnya, Karjo juga memiliki suka dan duka sebagai pegawai (supir) di Lemhannas. Beberapa dukanya adalah, persoalan bangun terlalu pagi, berangkat paling awal, pulang paling belakangan.

Tidak jarang kalau mobil rusak, Karjo juga kerap memperbaikinya sendiri dengan biaya sendiri pula. Dalam pikiran sederhananya yang penting pada saat jalan mobil lancar dan penumpang tidak terganggu. Karjo berpendapat, bahwa hal itu sudah melayani dengan baik dan maksimal sudah menjadi kewajiban sebagai pegawai (pekerja), walau bagaimanapun persoalan dan kesulitannya. Sehingga jangan heran, jika

mobil jemputan Karjo selalu penuh, dari jaman mobil masih elek sampai bagus seperti sekarang. Selain duka bangun terlalu pagi dan pulang paling belakangan, Karjo juga memiliki duka lainnya, misalnya penumpang yang mabuk, dan tidak hanya itu, ada juga penumpang yang harus ditunggu karena belum siap saat mobil jemputan datang. Meski Karjo sudah bangun dan berangkat pagi-pagi benar agar tidak terlambat. Justru malah sebaliknya penumpang yang telat.

Bapak yang memiliki anak semata wayang dan masih duduk di kelas II SMP tersebut mengaku bahwa ia tidak tahu persis mengenai Lemhannas, karena bertugas di lapangan. Meskipun demikian, Karjo melihat, Lemhannas sudah memiliki kemajuan, seperti ada apel pagi. Terkait persoalan remunerasi belum ke luar, Karjo tidak ambil pusing. Menurut dia, persoalan aturan remunerasi tersebut ada di “orang atas”. Kita “orang bawah” mau apa? Ya, tinggal tunggu saja. Selama bekerja yang paling berkesan bagi saya adalah bisa memiliki banyak teman dan disenangi penumpang. “Yang penting kalau bekerja itu harus tanggungjawab. Untuk HUT Lemhannas 20 Mei nanti, harapan saya Lemhannas semakin maju. Kalau buat saya pribadi, harapan saya, kesejahteraan ditingkatkan,” ungkap Karjo sambil menyeruput teh terakhirnya.

Kaum Muda Sebagai Agen Perubahan

Pemuda memiliki peran yang sangat sentral dalam setiap gerak perubahan zaman.



Berikan aku sepuluh pemuda,
akan kugoncangkan dunia
.Demikianlah selarik kalimat
yang bisa dijumpai pada
sampul bagian dalam buku
karya Dr. Aziz Syamsuddin
berjudul, Kaum Muda Menatap
Masa Depan. Kalimat tersebut
seakan menjadi kalimat
penjelas dan kalimat penegas,
bahwa kaum muda yang cerdas,
militan dan bersemangat

menjadi salah satu asset berharga bagi perubahan bangsa Indonesia. Tentu saja tidak dapat dibayangkan, jika suatu bangsa atau negara tidak memiliki pemuda yang cerdas, semangat, jujur, adil sudah dapat dipastikan bangsa tersebut akan mengalami kesulitan untuk berkembang menjadi lebih baik.

Hal itu pulalah yang ingin diungkap kembali oleh Aziz Syamsuddin, yaitu tentang kaum muda dan masa depan suatu bangsa, baik pada masa lalu (sejarah), sekarang (saat ini) maupun masa depan (masa yang akan datang), yang sedikit-banyaknya memberikan pengaruh bagi perubahan suatu bangsa. Sosok pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam pergolakan sejarah. Dalam setiap pergantian peradaban, di belakangnya selalu ada "darah muda" yang memeloporinya, tegas Aziz dalam catatan pengantar atau pendahuluan bukunya.

Buku Aziz Syamsuddin berjudul, Kaum Muda Menatap Masa Depan lebih-kurang membahas tentang kemerdekaan Indonesia dan kiprah pemuda, makna pemuda dan pembangunan, pembangunan hukum; menuju kearah tatanan yang lebih baik, kiprah pemuda dalam sejarah nasional yang selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti pemuda dalam lintasan sejarah.

Dalam hal ini Aziz mencoba memaparkan tentang peran, fungsi dan posisi pemuda dalam setiap lintasan sejarahnya, yaitu yang dimulai dari Era Kebangkitan Nasional, Era Sumpah Pemuda, Era Proklamasi, Era Orde Baru, dan Era Reformasi. Tidak hanya itu, dalam bukun Kaum Muda Menatap Masa Depan para pembaca juga bisa mengapresiasi tentang beberapa catatan kritis Aziz, seperti refleksi Indonesia pasca 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun sumpah pemuda dan 10 tahun reformasi yang selanjutnya disertai dengan strategi pemuda dalam menjawab permasalahan bangsa.

Dengan kata lain Aziz (penulis) ingin menyampaikan, bahwa pemuda memiliki peran yang sangat sentral dalam setiap gerak perubahan zaman. Di tangan kaum mudalah alur peradaban bergerak, menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk. Begitu juga dalam konteks Indonesia, sudah sedemikian banyak tokoh muda yang tercatat dalam sejarah yang menorehkan tinta emas karena keberhasilan mereka (hlm 176). Jika kapabilitas yang dimiliki oleh kaum muda sudah cukup layak untuk dibanggakan, pastilah generasi tua akan memberi jalan agar kaum muda mengambil alih estafet kepemimpinan. Generasi pendahulu tidak akan menghalang-halangi jika kaum muda memang sudah benar-benar layak untuk menjadi pemimpin (hlm 177).

Artinya buku yang memiliki ketebalan 188 halaman ini menjelaskan, bahwa untuk bisa membangun negara dan bangsa, kaum muda harus memiliki kapabilitas yang memadai, tidak sembarang kaum muda. Selain itu, Aziz juga menyampaikan tentang hubungan antara kaum muda dan kaum tua, tidak ubahnya seperti hubungan kakak dan adik, orang tua dan anak serta patner atau tim dalam bekerja, tentunya dalam membangun bangsa dan penyelesaian setiap persoalannya. Sehingga jelaslah kemudian peran kaum muda sebagai agen perubahan. (redaksi)

The J Curve:

A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall

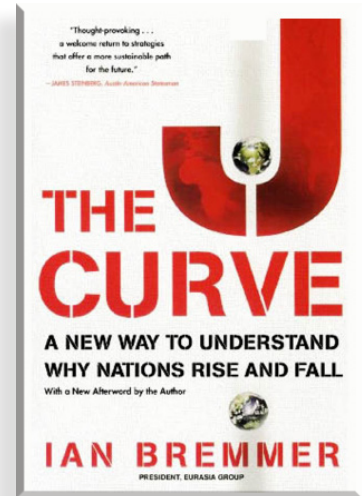
Detil Produk:

Hardcover: 320 halaman

Penerbit: Simon & Schuster (August 29, 2006)

Bahasa: English

Ukuran Buku: 9.3 x 6.2 x 1.1 inches



Biography Penulis:

Ian Bremmer adalah Direktur pada Eurasia Group, sebuah perusahaan konsultan terkemuka di dunia dalam bidang penelitian risiko politik. Ian juga penulis lepas di beberapa media terkemuka seperti *The Wall Street Journal*, *The Washington Post*, *Newsweek* serta berbagai jurnal internasional. Selain *The J Curve: A New Way*

to Understand Why Nations Rise and Fall, karya lain yang telah dipublikasi adalah *The Fat Tail: The Power of Political Knowledge for Strategic Investing* (Mei 2010) dan *The End of the Free Market: Who Wins the War Between States and Corporations?* (September, 2011).

Resensi :

Buku lawas yang menyajikan pemikiran tentang cara untuk memahami dunia yang sedang mengalami turbulensi – terutama para pemimpin lembaga yang bergerak di sektor publik maupun swasta yang berada di garis depan arus globalisasi – masih sangat layak dibaca. Apalagi tag line-nya yang sangat menantang dengan langsung mengarah pada sasaran penulisnya, yaitu sebuah cara baru untuk memahami mengapa sebuah bangsa bisa mengalami kejayaan atau keruntuhan. Dalam buku ini Ian Bremmer berpendapat, tidak satupun dari kita mampu mengabaikan risiko yang diciptakan oleh bangsa-bangsa gagal karena munculnya beragam penyakit, aksi terorisme, arus pengungsi atau hadirnya senjata pemusnah massal yang kini bisa menyerang ke wilayah sebuah negara dengan lebih mudah daripada masa-masa sebelumnya.

Dinamika kompleks keterbukaan dan stabilitas yang dibawa oleh globalisasi telah membawa berbagai bentuk tantangan tersendiri bagi masyarakat, pasar dan

pemerintah sehingga diperlukan cara-cara baru untuk menghadapinya. Buku ini juga memberikan kerangka kerja yang sangat baik untuk memahami perjalanan arus globalisasi. Selayaknya hukum kurva ekonomi, Kurva-J meletakkan Stabilitas di sisi kiri dan Keterbukaan di sisi lainnya.

J-Curve, atau Kurva J, adalah sebuah pendekatan inovatif untuk memetakan perilaku pemerintah di seluruh dunia akibat dinamika kompleks yang terjadi. Banyak buku telah diterbitkan untuk mengupas gejala ini, namun umumnya hanya memfokuskan pada dampak ekonomi dan sosial dari globalisasi belaka. Buku yang terbit pada tahun 2006 ini justru tampil beda. Penulisnya menyuguhkan sintesis dampak-dampak keterbukaan dan sekaligus menjelaskan bagaimana mereka dapat melemahkan atau menguatkan suatu bangsa, tergantung posisi keberadaannya pada cekungan sebuah kurva.

Analisisnya tentang sejarah, kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara-negara yang saat ini mempengaruhi stabilitas global, misalnya Korea Utara, Iran, Rusia, Saudia Arabia, Turki, dan Cina sangat mendalam dan masih cukup relevan. Buku ini tidak hanya menjelaskan dimana posisi negara-negara yang jadi contoh telaaannya, namun juga memberikan kerangka untuk menafsirkan peristiwa terkini dan memahami ke arah mana mereka menuju.

Ketidakstabilan panjang yang membahayakan perjalanan sebuah bangsa karena peralihan dari masyarakat “tertutup” menuju ke arah “terbuka”, adalah isu sentral buku ini. Meski di awal keterbukaan terjadi paradoks demokratisasi karena kondisinya lebih tidak stabil, jelas Kurva – J adalah sebuah model. Akhirnya, setelah membaca buku ini, nampaknya para pembaca diharapkan akan mendapatkan perspektif baru dalam memahami dan menafsirkan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah negara.

(Eddy Soepadmo)



Gubernur Lemhannas RI beserta staf menyampaikan persiapan seminar nasional kepada Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.



Pembukaan Seminar Nasional Lemhannas RI oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto pada 13 Desember 2011.



Salah satu narasumber seminar Prof. Dr. Juwono Sudarsono menyampaikan makalahnya di Auditorium Lemhannas RI.



Dr. Xu Qiyu dari Institute for Strategic Studies, NDUP-PLA, China, menyampaikan makalah dengan judul Stability in the Era of Democracy pada seminar nasional.



Prof. Iftikhar Ahmed dari Pakistan melakukan kunjungan kerja ke Lemhannas RI.



Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc, Sekretaris Utama Lemhannas RI, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke CESEDEN, sebuah lembaga kajian strategis Spanyol, pada 20 - 21 Maret 2012.



Menko Polhukam Djoko Suyanto menjadi
Keynote Speech pada Seminar Nasional
Lemhannas RI 13 Desember 2011



Donald Greenlees dari Australia menjadi
narasumber pada Seminar Nasional
Lemhannas RI



Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA meresmikan pembukaan Seminar IKAL yang bertajuk Membangun Sikap Kenegarawanan Alumni Lemhannas pada tanggal 31 Maret 2012.



Agum Gumelar sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI, menyampaikan makalah pada HUT IKAL ke-34.



TB Silalahi memberikan berbagai gambaran sikap kenegarawanan untuk menjadi inspirasi bagi peserta seminar.



Salah satu peserta Seminar IKAL, mantan Danpuspom TNI-AD Mayjen (Purn) Hendarji memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada narasumber.



Para narasumber dan moderator sambung pikir dalam Sesi I Seminar IKAL, berfoto bersama ketua panitia Togar Sianipar dan Wagub Lemhannas RI Letjen Moeldoko.



Para peserta seminar Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI khidmad menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum acara seminar dimulai.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA bertukar cinderamata dengan pendiri Harian Kompas Jacob Utama dalam kunjungan kerja ke Gramedia Grup.



Wagub Lemhannas RI Letjen Moeldoko dengan hangat menerima kunjungan Masril Kotto, pendiri lembaga keuangan mikro dari Sumatera Barat, di ruang kerjanya.



Salah satu pegawai menerima hadiah dari Ketua Persatuan Istri Anggota Lemhannas RI (PERISTA) Hera Widayanti Soepandji dalam pertemuan rutin 26 Januari 2012.



Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur Lemhannas RI selalu giat dan hadir dalam pertemuan rutin Persatuan Istri Anggota Lemhannas RI (PERISTA)



Gerak Jalan Bersama yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat Lemhannas RI dalam rangka HUT ke-47



Hadiah motor diterima oleh Kafianto, Staf Tata Usaha Lemhannas RI sesuai pelaksanaan acara Gerak Jalan Bersama.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA dan Wakil Gubernur Letjen Moeldoko sejenak memperhatikan lukisan Presiden Pertama RI Soekarno.



Foto bersama seluruh rombongan ziarah ke makam Presiden Pertama RI Soekarno di Blitar pada tanggal 12 Mei 2012 dalam rangka HUT Lemhannas RI ke-47.



Rombongan ziarah berkeliling di sekitar kawasan makam Presiden Pertama RI Soekarno.



Rombongan ziarah sesaat setelah khidmad berdoa di makam Presiden Pertama RI Soekarno.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA dan Ibu melakukan tabur bunga.



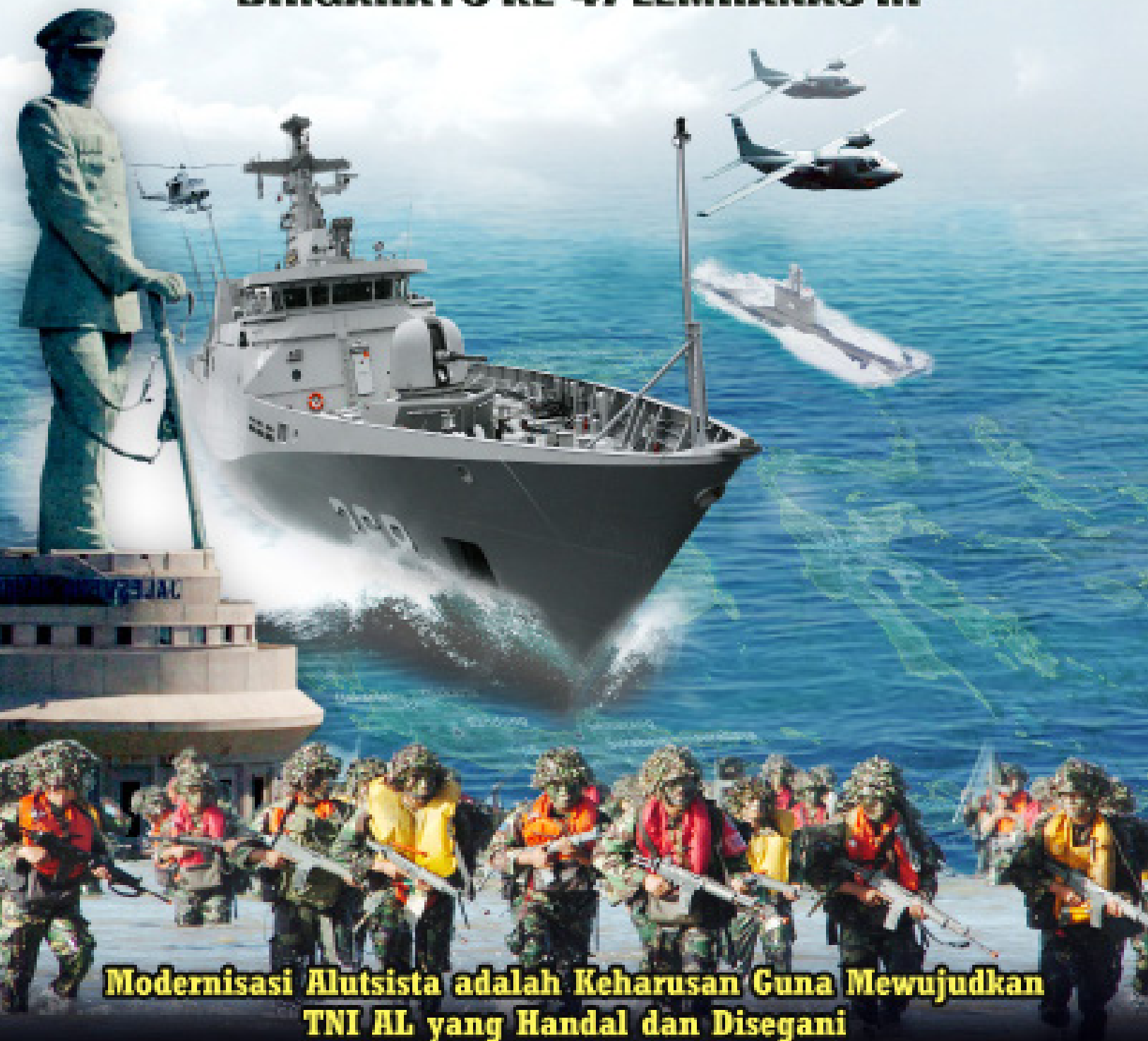
Wakil Gubernur Letjen Moeldoko dan ibu melakukan tabur bunga.



KEPALA STAF ANGKATAN LAUT BESERTA SEGENAP PRAJURIT TNI AL

Mengucapkan

DIRGAHAYU KE-47 LEMHANAS RI



**Modernisasi Alutsista adalah Keharusan Guna Mewujudkan
TNI AL yang Handal dan Disegani**



Indonesia Mengejar BRIC

Oleh : Dewi Sri Laksmi Triman, BS, Ak. CPA

Sejak 27 Mei 2011, telah dicanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI untuk mendukung pembangunan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Bank Dunia, di tahun 2012 ini mengalami koreksi dari target awal 6.7% menjadi 6.3% karena krisis ekonomi di Eropa, kenaikan harga minyak dunia dan bencana di Jepang.

Dalam penyediaan infrastruktur pemerintah memerlukan pembiayaan yang cukup besar sehingga perlu bantuan dana dari pihak swasta melalui kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) atau biasa disebut Public Private Partnership (PPP). Pelaksanaan KPS diatur dalam PerPres Nomor 13 Tahun 2010. Prosesnya meliputi 9 tahapan, yaitu: 1. Pemilihan Proyek, 2. Konsultasi Publik, 3. Studi Kelayakan, 4. Tinjauan Resiko, 5. Bentuk Kerjasama, 6. Dukungan Pemerintah, 7. Pengadaan, 8. Pelaksanaan dan 9. Pemantauan.

Pemerintah mengawali pelaksanaan 94 proyek bernilai Rp. 490,5 triliun semenjak dimulainya program MP3EI dari Mei sampai Desember 2011. Proyek ini terdiri dari 24 proyek pemerintah sebesar Rp.71,6 triliun, dan 24 proyek dari pihak swasta senilai Rp. 131 triliun. Sementara itu, 38 proyek dengan nilai Rp.168,6 triliun dan 8 lainnya senilai Rp. 128,3 triliun. Salah satu yang terkini, dan informasinya tersebar di media cetak, adalah pembangunan "New Priok Port" atau Pelabuhan Kalibaru

tahap pertama dengan nilai Rp. 18,36 triliun dan akan dimulai pada Juli 2012 atau setelah semua dokumennya lengkap. Selain untuk mendukung perkembangan ekonomi, manfaat dari pembangunan infrastruktur juga merupakan "public service obligation", dimana ujungnya akan tersedianya sarana prasarana publik yang bermutu dan efisien dengan pelayanan kualitas tinggi.

Tugas sektor swasta adalah pembiayaan, pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana. Sedang pemerintah sebagai pemilik aset berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kerjasama serta menerapkan pengaturan pelayanan masyarakat. Dalam program ini, berbagai manfaat akan diperoleh pihak swasta. Diantaranya dalam memperluas investasi di proyek-proyek milik pemerintah berikut dukungan fiskal dan non fiskal serta memperoleh jaminan terkait peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, arus keuangan pemerintah akan lancar dan dana APBN dapat digunakan untuk kepentingan lain.

Pengawasan

Banyak yang masih harus diawasi untuk perbaikan proses pengembangan dan pelaksanaan KPS ini. Usulan proyek yang belum sempurna dan matang dalam persiapan akibat kurangnya pemahaman mengenai mekanisme KPS beserta siklus perencanaannya, sering menimbulkan penyimpangan di kemudian hari. Faktor kurangnya pengalaman dari semua pihak yang terkait, juga akan memunculkan permasalahan. Misalnya yang



menyangkut kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan dinamika ekonomi yang kurang kondusif. Hal-hal tersebut menimbulkan risiko dan ketidak pastian kerjasama konsesi jangka panjang yang sering mengakibatkan putusnya kontrak di tengah jalan.

Swasta menjaga agar biaya tidak "overrun", sedang pemerintah hanya merujuk pada kesepakatan dalam perjanjian. Disinilah tahap kemungkinan celah penyimpangan dalam pengadaan (penggelembungan harga) ataupun pemborosan yang mengakibatkan pembiayaan proyek dari perbankan membesar yang membawa konsekwensi besarnya bunga pinjaman. Dan jika terkait *Built Operate and Transfer (BOT)* atau bangun guna serah, di akhir masa kerjasama konsesi, kondisi bangunan/infrastruktur yang diserahkan kepada pemerintah sudah dalam kerusakan yang parah.

Bila dicermati, di tahap kesembilan, atau tahap pemantauan, menurut pendapat penulis adalah yang sangat penting. Tujuan pemantauan ini diaplikasikan dalam 4 (empat) tahap. Tahap pertama, memastikan operasi proyek sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Tahap kedua untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan telah sesuai dengan Proyek Kerjasama (PK). Tahap ketiga, proyek KPS berjangka waktu lama sehingga harus dipantau dengan menangani berbagai

macam perubahan atau masalah yang mungkin muncul. Dan di tahap keempat, adalah tentang antisipasi pengalihan asset kembali kepada pemerintah apabila ada.

Pemerintah seharusnya diberikan pujian atas program MP3EI yang telah melahirkan KPS dan dapat menguntungkan kedua belah pihak untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Program inipun juga sudah memiliki proteksi dari para oportunist. Khususnya di bentuk kerjasama (tahap kelima) dan pengadaan (tahap ketujuh). Disarankan, program ini menggunakan pengawas atau pemantau independen dari awal proses pengembangan dan pelaksanaan KPS sampai berakhirnya masa kerjasama. Tim bisa berasal dari Unit pencegahan KPK, UKP4 atau bentuk lainnya. (baca juga artikel penulis di majalah Ketahanan Nasional Lemhannas RI edisi ke-93 .Red).

Lancarnya proses pelaksanaan KPS dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai pembukaan UUD 1945, berarti tercapainya MP3EI menghantar negara tercinta Indonesia sejajar dengan keempat negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan Cina) yang mempunyai pertumbuhan ekonomi cepat dan diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi dunia ditahun-tahun mendatang. Semoga Tuhan YME mengabulkan cita-cita bangsa Indonesia. Amin

Penulis adalah Akuntan Publik Registrasi di California, AS dan Indonesia

Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji mengakui, secara faktual, program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mencapai harapan bersama.

Hal itu dikemukakan dalam seminar “Penanggulangan Kemiskinan dan Dampaknya guna Mengakselerasi Pencapaian Kesejahteraan Rakyat dalam rangka Ketahanan Nasional” yang diselenggarakan menyongsong HUT ke-47 Lemhannas pada 20 Mei 2012. Seminar ini membahas penyebab belum optimalnya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan, dampak yang timbul jika masalah kemiskinan tidak dapat ditanggulangi dan konsep penanggulangan kemiskinan guna memperkokoh ketahanan nasional.

Berdasarkan data yang dikeluarkan biro pusat statistik, tercatat bahwa pada september 2011, jumlah rakyat miskin berjumlah 29,89 juta jiwa, atau 12,36% dari total penduduk Indonesia. Mempertimbangkan bahwa target pencapaian tujuan pembangunan milenium semakin dekat dan masih tingginya angka kemiskinan di tanah air, maka perlu dirumuskan langkah-langkah terobosan dan konkret dari para ahli di bidangnya.

Sebagai persiapan, Lemhannas RI telah merumuskan langkah – langkah strategis pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada 25 April 2012 yang lalu.

Lemhannas RI memandang bahwa masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat merupakan masalah mendasar yang harus

mendapat perhatian bersama, baik kalangan pemerintah, politisi, akademisi maupun oleh seluruh komponen bangsa terkait lainnya.

Pada September tahun 2000, Indonesia turut menandatangani komitmen dan deklarasi milenium dalam bentuk tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goal’s – MDG’s). Sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan, tujuan pembangunan milenium tersebut diharapkan akan tercapai secara keseluruhan pada tahun 2015.

Menko Kesra Agung Laksono dalam sambutannya antara lain mengemukakan, penanggulangan kemiskinan sudah menjadi isu global sejak ditandatanganinya Deklarasi Millenium Development Goals (MDG’s) pada tahun 2000 oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari delapan tujuan MDG’s, pengurangan kemiskinan dan kelaparan menjadi tujuan pertama. Adapun target MDG’s untuk Indonesia pada tahun 2015 adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin hingga separuhnya dari angka kemiskinan tahun 1990, yaitu sekitar 7,5 persen dari total jumlah penduduk.

Namun demikian, ujarnya, tingkat kemiskinan dan disparitas antar provinsi masih besar dimana hampir separuh provinsi di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan dan disisi lain kelembagaan ekonomi

perdesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian perdesaan masih lemah.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu 2007-2014 dilaksanakan melalui empat Kelompok Program/Kluster. Melalui Perpres Nomor 15 tahun 2010 telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wapres. TNP2K ini memiliki tugas antara lain menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Apabila koordinasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ini dapat ditingkatkan, kata Agung Laksono, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan akan efisien dan efektif sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin memperoleh hak-hak dasarnya, dan pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan lebih cepat lagi diwujudkan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pada bagian lain, Agung Laksono mengatakan, penurunan angka



kemiskinan belum sesuai dengan harapan. Untuk bisa mengejar target penurunan sebesar 8 persen di tahun 2014, diperlukan paling tidak sebesar 1 persen per tahun. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan agar bisa mengejar target tersebut.

Pengamat ekonomi Dr. Aviliani yang juga menjadi pembicara menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup baik, namun tidak demikian dari sisi kualitas, juga masih diwarnai kesenjangan yang tinggi antara yang kaya dan yang miskin.

Kurikulum pendidikan, lanjutnya, sering juga tidak nyambung dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Contohnya, Indonesia masih membutuhkan sekitar 13.000 insinyur, tetapi sebagian insinyur malah bekerja tidak pada bidang pendidikannya, tetapi lebih suka menjadi bangkir atau pengusaha.

Pendapatan per kapita rakyat Indonesia, menurut Aviliani, memang meningkat dari tahun ke tahun dari 807 dolar AS pada 2000 menjadi 3.523 dolar pada 2011. Namun hampir separuh dari warga terutama yang berada di kawasan Indonesia bagian timur berada di bawah rata-rata nasional. Lemhannas RI memandang bahwa masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat merupakan masalah mendasar yang harus mendapat perhatian bersama, baik kalangan pemerintah, politisi, akademisi maupun oleh seluruh

komponen bangsa terkait lainnya.

Menurut dia, angka kemiskinan di Indonesia juga telah berhasil ditekan dari tahun ke tahun yakni sebanyak 35,1 juta (15,97 persen) pada 2005 menjadi 30,02 juta (12,49 persen) pada Maret 2011. Sementara pengamat sosial, Imam Prasodjo Ph.D. antara lain mengemukakan, cukup sulit meramu Indonesia menjadi bangsa yang modern mengingat keanekaragaman budaya, etnis, agama dan suku di Indonesia.

Menurut dia, perlu dikembangkan strategi pembangunan baru yang berwawasan sosial, budaya dan lingkungan serta konsep pembangunan yang integratif (tidak segmental) dan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

Salah satu konsep yang perlu dikembangkan, ujarnya, yakni konsep "Human Eco Happiness" untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Sedangkan sukses kunci pembangunan, menurut Imam Prasadjo, adalah keberpihakan pada rakyat miskin, inovatif, partisipatif dan integratif. Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak mengulangi lagi kekeliruan masa lalu dengan melakukan konsep pembangunan "top-down", melainkan dengan "down-top" yang lebih "humble" atau mewakili aspirasi dan melibatkan dukungan dukungan rakyat banyak.

"Memberikan ikan pada rakyat, dinilai salah karena hanya memberikan kebutuhan hidup

sesaat, tetapi memberikan kail saja juga tidak cukup," ujarnya seraya menambahkan, yang perlu diberikan adalah program yang melibatkan partisipasi rakyat, misalnya dengan membangun koperasi, industri ikan olahan atau fasilitas lainnya bagi nelayan yang membuat mereka mampu berusaha.

Pembicara lainnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ir. Gondo Radityo berpendapat, penanggulangan kemiskinan, tuturnya, adalah kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Namun menurut dia, program penanggulangan kemiskinan masih memerlukan penyamaan persepsi terhadap beberapa hal seperti konsep, definisi hak dasar dan kebutuhan pokok, bagian HAM yang dijamin, faktor penyebab, baik internal maupun eksternal.

Diperlukan pula dukungan alokasi anggaran agar efektivitas penggunaan anggaran diarahkan untuk mengatasi pengurangan kemiskinan dan mengakselerasi secara signifikan, sedangkan alokasi anggaran dilakukan secara proporsional kepada Kementerian/Lembaga serta anggaran harus berbasis kinerja dan program dengan proporsionalitas antara belanja pegawai, belanja barang dan bantuan sosial.



Mengasah Gergaji

Oleh : Moeldoko

Dengan menyatakan kita bekerja di Lemhannas, kita sudah dengan tegas menjelaskan dimana posisi serta peran apa yang kita jalankan.

Di tempat sebuah perusahaan kayu, dua pemuda dengan penuh semangat menaikturunkan gergajinya tak kenal lelah. Demi target yang telah ditentukan mandornya, mereka memotong-motong kayu dari pagi sampai menjelang malam. Ditambah semangat mengejar bonus, dua pemuda tersebut bekerjasama mati-matian untuk mendapatkan hasil maksimal. Di hari pertama mereka bekerja, 25 batang kayu gelondongan terbelah menjadi potongan-potongan kecil siap disetor.

Tentu, hasil kerja mereka ini menuai pujian sang mandor. Di hari pertama kerja itu, mereka berdua mendapat upah yang layak setelah ditambah bonus karena bekerja melebihi target. Termotivasi oleh kedua hal tadi, keesokan harinya dengan penuh gairah mereka berdua melanjutkan pekerjaan lebih bersemangat lagi. Aneh, meski dengan ritme, kerjasama, kekuatan dan waktu yang sama, ternyata mereka hanya bisa menyelesaikan 21 batang kayu gelondongan. Selanjutnya, di hari ketiga, meski dengan ngotot mengeluarkan kemampuan dan kekompakan yang solid, ternyata juga hanya sanggup menyelesaikan 16 batang kayu. Dan di hari-hari kerja berikutnya, jumlah kayu yang mampu mereka gergaji juga semakin menyusut. "Mungkin kita telah kehilangan kekuatan dan kerjasama," kata salah satu diantara kedua pemuda tersebut seakan melakukan introspeksi diri.

Sedikit bingung berdua menemui mandornya. Sambil meminta maaf, mereka menyampaikan ketidakmengertiannya atas peristiwa tersebut. "Kapan

terakhir kalian mengasah gergaji?" tanya Mandor dengan bijak.

"Mengasah? Maaf, kami tak memiliki waktu untuk mengasah gergaji, Pak. Selama ini kami sangat sibuk bekerja keras memotong-motong kayu untuk menyelesaikan target bapak," jawab salah satu di antara kedua pemuda tersebut.

Kisah di atas adalah pelajaran bagi kita semua, mengasah gergaji sejatinya seperti mengasah pengetahuan dalam hidup saat menjalankan pekerjaan sehari-hari. Karena hal tersebut memang semata untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan kewajiban kerja. Tanpa selalu mengasah pengetahuan, nampaknya juga kita akan gagal memahami perubahan lingkungan strategis yang bergerak bak turbulens: cepat dan terkadang berubah arah dengan ekstrem. Bisa diduga, akibat dari kurang rajinnya kita mengasah pengetahuan ini, produktifitas kerja kita pun akan menurun dari waktu ke waktu.

Memahami lingkungan strategis yang bergerak sangat dinamis ini, baik yang internal maupun eksternal, memang bukan pekerjaan mudah. Dan sebagai lembaga yang memiliki "core" keilmuan di bidang lingkungan strategis, tentunya sangat naif kalau kita di lingkungan internal sendiri malah mengabaikan hal ini. Untuk itu, saling mengasah pengetahuan untuk memahami lingkungan strategis yang kita hadapi, dengan tetap memelihara semangat saling asih dan asuh, nampaknya masih merupakan suplemen kerja bagi kita semua.



Filsafat dan Makna Kerja

Seperti kita ketahui bersama, kerja adalah bagian sentral di dalam kehidupan manusia. Dengan pikiran dan tubuhnya, manusia mengorganisir pekerjaan, membuat benda-benda yang dapat membantu pekerjaannya tersebut, dan menentukan tujuan akhir dari kerjanya.

Saat ini, bekerja bukanlah hukuman untuk manusia seperti yang tertera dalam cerita di kitab suci bangsa Yahudi akibat manusia yang tidak mematuhi perintah-Nya. Tapi menurut Peter Drucker, seorang pakar manajemen modern, kerja adalah sisi utama dari kehidupan manusia. Hal tersebut juga tertulis dalam karya puisi klasik Yunani, Hesiodotus, dalam *Work and Days*.

Pemahaman tentang kerja ini, sejak filsuf asal Inggris John Locke sampai Karl Marx yang filsuf Jerman, refleksi filsafatnya memang selalu berubah. Namun Prof. Murnis Suseno secara ringkas menegaskan bahwa pada dasarnya kerja memiliki tiga fungsi. Yaitu fungsi reproduksi material, integrasi sosial, dan pengembangan diri. Yang pertama, dengan bekerja manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, dengan bekerja manusia mendapatkan status di masyarakat sehingga termasuk warga yang bermanfaat. Dan yang ketiga, dengan bekerja manusia mampu secara kreatif menciptakan dan mengembangkan dirinya.

Pada dimensi sosial reproduksi material, tentunya dengan mudah kita bisa memahaminya. Karena dengan bekerja sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah, masing-masing individu mendapat hak berupa gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup dari negara. Sehingga dari penghasilan tersebut, kita memiliki ruang dan waktu untuk berkeluarga, berpikir, merenung, dan terus belajar. Namun bila tidak memanfaatkannya dengan baik, maka tentu kita akan kurang maksimal dalam mereproduksi material sekaligus gagal sebagai manusia yang mampu tumbuh dengan sehat. Kisahnya, bisa diduga, akan seperti cerita pekerja penggergaji kayu yang kehilangan efektifitas kerjanya tadi.

Dimensi sosial sebagai manusia yang memiliki status sebagai warga negara yang bermanfaat, sangat mudah pula kita mengartikannya. Dengan menyatakan kita bekerja di Lemhannas misalnya, kita sudah dengan tegas menjelaskan dimana posisi serta peran apa yang kita jalankan. Padahal pernyataan ini membawa konsekuensi yang sungguh tidak sederhana. Karena kita kemudian akan dituntut sebagai manusia yang layak bekerja dalam lembaga yang senantiasa berpikir untuk ketahanan bangsanya dari segala macam ancaman baik dari dalam dan luar negaranya. Hal ini seperti menegaskan pendapat Drucker, bahwa profesi seseorang menentukan tempatnya di masyarakat.

Selanjutnya pada dimensi sosial ketiga, kita semua juga selalu dituntut untuk mampu secara kreatif menciptakan dan mengembangkan diri. Tidak hanya kita sebagai manusia pekerja yang menerima tuntutan ini, namun ternyata Lemhannas RI sebagai lembaga pun – dimana kita saat ini bekerja – juga telah dituntut untuk mengembangkan diri ke level yang lebih tinggi: *World Class Institution*. Dan komitmen ini telah dinyatakan berungkuh oleh pimpinan kita semua, yaitu Bapak Gubernur Lemhannas RI di setiap saat dan tempat.

Akankah tantangan membuat sejarah ini kita lewatkan begitu saja? Tentu saja tidak. Sebagai pekerja yang berada di lingkungan Monas, dimana lembaga-lembaga terhormat dan penting lainnya juga berada di sekitar lingkungan ini, kesadaran untuk membuat sejarah dengan menaikkan status lembaga kita berstandar internasional, visi tersebut haruslah tetap kita kawal dengan serius dan sungguh-sungguh.

Kita sejatinya saat ini memiliki modal besar serta momentum yang tepat untuk itu. Modal tersebut adalah diri kita sendiri dengan momentum perayaan ulang tahun ke-47. Dan bukankah kita juga telah memiliki komitmen untuk selalu mengasah pengetahuan agar tak kehilangan kekuatan dan kerjasama dalam memuliakan lembaga yang kita cintai bersama ini? Dirgahayu Lemhannas RI.

Penulis adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI

Kegiatan Penting Lemhannas RI

Mei

21-25 Mei 2012,

Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Konsepsi Nasional dan Kepemimpinan bagi Asosiasi DPRD Kabupaten (ADKASI) Angkatan II.

22 - 25 Mei 2012,

Tutorial II untuk Program Pendidikan Reguler Angkatan 48.

24 Mei 2012,

Direktorat Pengkajian Ekonomi melaksanakan RTD Aktual, "Pengembangan Ekonomi Kreatif guna Menciptakan Lapangan Kerja dan Mengentaskan Kemiskinan dalam rangka Ketahanan Nasional".

28 Mei - 2 Juni 2012,

Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan .

28 Mei - 3 Juni 2012,

Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Konsepsi Nasional dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (ADEKSI) Angkatan XXXI.

31 Mei 2012,

Direktorat Pengkajian Sosbud melaksanakan RTD Kajian Berlanjut, "Membangun Kerukunan Umat Beragama guna Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional".

29 & 30 Mei 2012,

Direktorat Pengkajian Hankam melaksanakan RTD Kajian Aktual II, "Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI".

Mei 2012,

Direktorat Pengkajian Internasional melaksanakan Kajian Aktual, "Membangun ASEAN Cultural Community dalam rangka Ketahanan Nasional".

Juni

Juni 2012,

Kegiatan belajar untuk peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 47.

8 - 10 Juni 2012,

Kegiatan Outbound untuk PPRA 48.

10 - 15 Juni 2012,

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Pemuda Angkatan IV.

12 - 15 Juni 2012,

Tutorial II dan off-campus PPSA 18.

15 - 17 Juni 2012,

Outbound PPSA 18.

26 Juni 2012,

Malam Perkenalan dan International Night PPRA XLVIII.

28 Juni 2012,

Direktorat Pengkajian Hankam melaksanakan RTD Kajian Aktual II, "Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI".

Juli

Juli 2012,

PPRA 48 On Campus .

2 - 7 Juli 2012,

Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan .

3 Juli 2012,

Deputi Pendidikan melaksanakan malam perkenalan PPRA 48 .

10 Juli 2012,

Acara pengenalan budaya asing PPRA 47.

Juli 2012,

PPRA 48 On Campus.

22 - 27 Juli 2012

PPRA 47 Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo.

Juli 2012,

Direktorat Pengkajian Hankam melaksanakan Kajian Berlanjut, "Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI".

Juli 2012,

Direktorat Pengkajian Internasional melaksanakan Kajian Berlanjut berkoordinasi dengan Kemenakertrans, "Grand Design Pelaksanaan TKI ke Luar Negeri guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional".

“ Berkat bank negeri sendiri

saya bisa punya usaha ukiran sendiri! ”



Semua bisa jadi milik sendiri

Sebagai bank negeri sendiri yang memahami semua sama baiknya, BANK BRI siap membantu mewujudkan impian Anda dengan berbagai pilihan produk dan layanan perbankan terbaik.

BANK BRI juga mendapatkan penghargaan sebagai bank terbaik kedua di Asia Pasifik dan menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang terpilih sebagai 50 perusahaan terhebat di Asia dari :